

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen



Oleh:

**AGURHAN
2017.MM.2.0809**

**PROGRAM PASCASARJANA
STIE NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2020**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen



Oleh:

**AGURHAN
2017.MM.2.0809**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN**

**STIE NOBEL INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

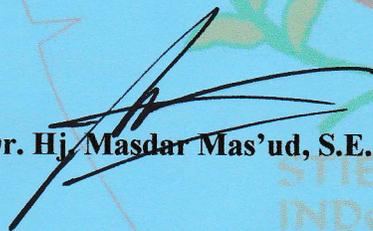
Oleh :
AGURHAN

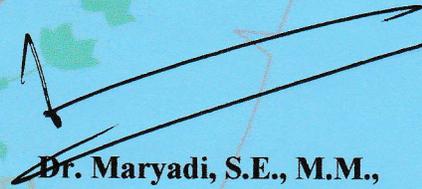
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 13 Februari 2020
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,

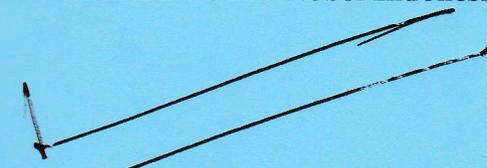

Prof. Dr. Hj. Masdar Mas'ud, S.E., M.Si.


Dr. Maryadi, S.E., M.M.,

Mengetahui :

Direktur PPS STIE Nobel Indonesia,

Ketua Prodi Magister Manajemen,


Dr. Maryadi, S.E., M.M.


Dr. Muhammad Idris, S.E., M.Si.

HALAMAN IDENTITAS

MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI

JUDUL TESIS :

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN PINRANG**

Nama Mahasiswa : Agurhan
NIM : 2017MM20809
Program Studi : Magister Manajemen
Peminatan : Manajemen Keuangan

KOMISI PEMBIMBING:

Ketua : Prof. Dr. Hj. Masdar Mas'ud, S.E., M.Si.
Anggota : Dr. Maryadi, S.E., M.M

TIM DOSEN PENGUJI :

Dosen Penguji 1 : Dr. Ahmad Firman, S.E., M.Si
Dosen Penguji 2 : Dr. Hj. Fatmasari, S.E., M.M., M.Si

Tanggal Ujian : 13 Februari 2020

SK Penguji Nomor : 092/PPS/STIE-NI/II/2020

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MANAJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, Februari 2020
Mahasiswa Ybs,




Agurha
NIM: 2017.MM.2.0809

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Karunia dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan Pendidikan Program Pascasarjana Magister Manajemen (M.M) pada Program Pascasarjana (PPS) STIE Nobel Indonesia.

Dalam penyusunan hingga terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, S.E., MM selaku Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar.
2. Bapak Dr. Maryadi., S.E., M.M, Direktur Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar sekaligus selaku Anggota Komisi Pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis selama penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Idris, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen PPS STIE Nobel Indonesia Makassar yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar sehingga penyelesaian studi dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Masdar Mas’ud, S.E., M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Firman, S.E., M.Si dan Ibu Dr. Hj. Fatmasari, S.E., M.M, M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan arahan-arahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Indonesia yang membekali penulis untuk selangkah lebih maju sehingga tesis ini terwujud.
7. Kedua Orang Tua saya yaitu ayahanda Abd. Madjid dan Ibunda (Almarhumah) Hj. Sapiah Lagommo serta Mertua Bapak (Alm) Saiful Semaun dan Ibu Hj. Rahmatiah Syamsi.
8. Istriku tercinta Salma Nur Saiful, S.Pd, dan Anak-anakku tersayang Nur Afiah Azizah Agurhan, Muh. Nur Affan Agurhan dan Nur Aqilah Azizah Agurhan.
9. Bapak Bupati Pinrang H. Andi Irwan Hamid, S.Sos dan Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang Bapak H. Hairuddin Bakri, SH yang telah banyak membantu baik materil maupun moril serta memberikan izin dalam mengikuti Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Indonesia.
10. Bapak/Ibu Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta bersedia menjadi responden penelitian.
11. Keluarga, teman-teman seangkatan dan seluruh civitas akademika Pascasarjana Magister Manajemen STIE Nobel Indonesia yang banyak membantu selama studi.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritikan senantiasa penulis terima untuk pengembangan selanjutnya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi civitas akademika STIE Nobel Indonesia Makassar.

Makassar, 13 Februari 2020

Penulis,

AGURHAN

ABSTRAK

Agurhan. 2020. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang, dibimbing oleh Hj. Masdar Mas'ud dan Maryadi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis (1) pengaruh regulasi, komitmen, karakteristik individu, dan perangkat pendukung terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (2) variabel yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang, dengan waktu penelitian adalah pada bulan Oktober sampai November 2019. Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survei. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang yang jumlahnya sebanyak 30 orang. Penentuan sampel dengan teknik sampling jenuh (sensus) dimana semua populasi dijadikan sampel, sehingga diperoleh sampel sebanyak 30 orang pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perangkat pendukung secara sendiri-sendiri (parsial) dan bersama-sama (simultan) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang berpengaruh nyata (0,031) (2) variabel lainnya yaitu regulasi (0,558), komitmen (0,092), dan karakteristik individu (0,241) tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

Kata kunci: *regulasi, komitmen, karakteristik individu, perangkat pendukung, dan pengelolaan keuangan*



ABSTRACT

Agurhan. 2020. *Factors Affect Regional Financial Management at the Regional Finance Agency of Pinrang Regency, supervised by Hj. Masdar Mas'ud and Maryadi.*

This study aims to examine and analyze (1) the effect of regulation, commitment, individual characteristics, and supporting tools on regional financial management at the Regional Financial Board of Pinrang Regency (2) the most dominant variable affects the regional financial management at the Regional Financial Agency of Pinrang Regency.

This study was conducted at the Regional Finance Agency of Pinrang Regency from October to November 2019. This study used a quantitative method with the type of survey study. In this study, the population was all employees of the Regional Finance Agency of Pinrang Regency with 30 people. The sample was determined by using a saturated sampling technique (census) where all the population was being sampled and obtain a sample of 30 employees of the Regional Finance Agency of Pinrang Regency. Data analysis used multiple regression analysis.

The results show that (1) supporting devices partially and simultaneously affects the regional financial management at the Regional Financial Board of Pinrang Regency significantly with the value (0.031) (2) other variables, namely regulation (0.558), commitment (0.092), and individual characteristics (0.241) do not have a significant effect toward regional financial management at the Regional Finance Agency of Pinrang Regency.

Keywords: *regulation, commitment, individual characteristics, supporting tools, and financial management*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
IDENTITAS MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	10
2.2. Kebijakan Publik.....	12

	Halaman
2.3. Implementasi Kebijakan.....	13
2.4. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	18
2.6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan	23
2.7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja	23
2.8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 tahun 2006 dan PP Nomor 71 Tahun 2010	26
 BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1. Kerangka Konseptual.....	29
3.2. Hipotesis Penelitian	34
3.3. Definisi Operasional Variabel	35
 BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1. Metode Penelitian	37
4.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	37
4.3. Teknik Pengumpulan Data	38
4.4. Instrumen Pengumpulan Data	39
4.5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	42
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Hasil Penelitian.....	45
5.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
5.1.2. Identitas Responden	52
5.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian	54
5.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas	65
5.1.5. Uji Asumsi Klasik	68
5.1.6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	72

5.1.7. Pengujian Hipotesis.....	75
5.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	84

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	91
6.2 Keterbatasan Penelitian.....	91
6.3 Saran-Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1. Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin.....	52
Tabel 5.2. Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur	53
Tabel 5.3. Sebaran Responden Menurut Masa Kerja.....	53
Tabel 5.4. Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Regulasi	54
Tabel 5.5. Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Komitmen	57
Tabel 5.6. Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Individu	59
Tabel 5.7. Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Pendukung	61
Tabel 5.8. Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Pengelolaan Keuangan	63
Tabel 5.9. Hasil Uji Item Variabel.....	66
Tabel 5.10. Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel	68
Tabel 5.11. Hasil Uji Multikolinearitas	69
Tabel 5.12. Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 5.13. Hasil Perhitungan Regresi.....	73
Tabel 5.14. Hasil Uji t	76
Tabel 5.15. Hasil Uji F	81
Tabel 5.16. Hasil Uji Beta	83
Tabel 5.17. Hasil Uji Determinasi	84

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penelitian	33
Gambar 5.1. Grafik Scatter Plot	70
Gambar 5.2. Uji Normalitas	72

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian
2. Hasil Kuesioner Penelitian
3. Uji Validitas dan Reliabilitas
4. Analisis Regresi
5. Surat Izin Penelitian
6. Tanda Bukti Bebas Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keuangan Negara sesuai bunyi pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara merupakan salah satu faktor dalam menjalankan suatu negara karena tanpa keuangan pemerintahan tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Mengingat begitu vitalnya keuangan negara dalam mengelola uang rakyat maka dibentuk suatu Lembaga untuk mengelola keuangan negara dengan tujuan menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan perekonomian negara. Dengan dikelolanya keuangan negara secara arif dan bijaksana maka tujuan bernegara yaitu mensejahterakan rakyat dapat dicapai. Sebaliknya jika keuangan negara tidak dikelola secara arif dan bijaksana justru akan menimbulkan masalah bagi negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Maka dari itu dalam pengelolaan uang negara haruslah dikelola sebaik mungkin serta dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat karena hal ini sangat besar dampaknya terhadap suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Dalam hal mengelola keuangan negara dibutuhkan koneksi dengan semua pihak terkait salah satunya yaitu kebijakan yang dikeluarkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus diselaraskan sebaik mungkin terutama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Pelaksanaan Otonomi daerah yang diwujudkan melalui desentralisasi yang luas dibarengi dengan tanggung jawab dan dikerjakan dimplementasikan secara nyata. Pengelolaan keuangan daerah merupakan issue penting yang mesti dipertimbangkan oleh pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan demi terlaksananya otonomi sebagaimana untuk mengelola keuangan dan sumberdaya yang akan digunakan untuk membangun daerah demi kesejahteraan rakyat. Apalagi dibarengi dengan tuntutan masyarakat untuk mengelola keuangan rakyat secara arif dan bijaksana disamping menjalankan pemerintahan yang bersih. Implementasi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat melalui pembangunan yang dapat berdampak langsung kepada rakyat disertai adanya transparansi dan partisipatif disertai penelaan secara efektif, efisien dan akuntabel

Peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah secara tegas dan jelas dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) yang merupakan penjabaran pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sekarang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan pengganti pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas 18 (delapan belas) BAB dan 336 Pasal serta terdiri atas beberapa lampiran meliputi Lampiran A tentang Perencanaan dan Penganggaran, Lampiran B tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Lampiran C tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Lampiran D tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Lampiran E tentang Akuntansi dan Pelaporan dengan total halaman sejumlah 155 halaman.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah telah terbit pula sebelumnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (sekarang telah

diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Penerapan kedua peraturan ini dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai peraturan pengganti atas pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentunya memberikan beban psikologis bagi aparat pengelola keuangan daerah khususnya pemerintah daerah yang mempunyai keterbatasan aparatur / SDM yang berlatar belakang pendidikan di bidang keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Untuk menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, tim penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus melakukan konversi-konversi akun yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini disebabkan adanya akun-akun yang berbeda antara akun dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan akun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang harus dikonversi berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS).

Pada tahun 2010 Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP 24 Tahun 2005. Berdasarkan PP 71 tahun 2010 maka unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bertambah dari sebelumnya 4(empat) unsur menjadi 7 (tujuh) unsur yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas

(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sejalan dengan itu pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya pada tahun 2019 Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Namun peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan pemerintah ini berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri belum ada sehingga belum efektif dalam pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memang mengamanahkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini paling lambat diterbitkan 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019. Pada tahun 2019 ini juga Kementerian Dalam Negeri RI mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Adanya perubahan aturan atau regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sering dilakukan oleh pembuat kebijakan (regulator) tentunya cukup merepotkan dalam tataran implementasi pada instansi pemerintah daerah pada umumnya termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. Begitu pula kebijakan

yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah dalam rangka pergeseran atau mutasi pegawai termasuk para pegawai yang sebelumnya ditugaskan mengelola keuangan tentunya berdampak pada kinerja pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengimbangi adanya pengaruh perubahan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang setiap tahun berupaya meningkatkan anggaran peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam APBD Kabupaten Pinrang. Anggaran ini ditujukan sebagai upaya dalam membekali dan meningkatkan pengetahuan PNS/ASN terutama yang berkecimpung di bidang pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terkait dengan tata cara dan mekanisme pengelolaan keuangan negara/daerah.

Selain itu perlu dibangun komitmen dan sinergitas yang kuat secara bersama antara pimpinan dan staf pada tataran organisasi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) termasuk tata kelola keuangan daerah sesuai regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal yang urgen untuk mendapatkan perhatian pula berupa penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang berbasis teknologi informasi berupa hardware dan software sangat mendukung penerapan tata kelola keuangan daerah yang baik dan cepat.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun penelitian yang dilaksanakan, peneliti melakukan pembatasan obyek penelitian pada satu pemerintah daerah saja yaitu Pemerintah Kabupaten Pinrang khususnya melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi atas penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa faktor yaitu regulasi, komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung serta beberapa faktor terkait yang memiliki kaitan terhadap implementasi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah regulasi, komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang?
2. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh regulasi, komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk menguji dan menganalisis variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Pinrang, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, peneliti berikutnya dan pihak-pihak lainnya. Adapun beberapa manfaat penelitian ini meliputi :

a. Manfaat Akademik

- 1) Bagi penulis secara pribadi merupakan sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir secara sistematis dan teoritis dalam memecahkan suatu permasalahan secara objektif melalui karya ilmiah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat teruji sesuai metode ilmiah yang digunakan;
- 2) Bagi rekan-rekan peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan perbandingan dalam pelaksanaan penelitiannya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Pinrang agar menjadi bahan acuan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pinrang
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Syafrida Fitrie (2013) dalam penelitiannya dengan judul “*Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Binjai*”. Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi terhadap implemementasi Keuangan Daerah Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara terhadap peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan menganalisis mekanisme dan tatacara Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai berdasarkan perspektif Permendagri No. 13 Tahun 2006 disertai dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Data yang digunakan adalah data yang bersifat kualitatif dari Pemerintah Kota Binjai, yang meliputi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Binjai. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang bersifat eksploratif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat daerah Kota Binjai. Hal ini disebabkan karena arah dan kebijakan umum anggaran (KUA) mencerminkan dominannya kepentingan elit penguasa serta belum optimalnya peran Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai dalam mengawal penyusunan APBD Kota Binjai.

Ade Tri Aji Kusumah (2014). *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, Efektifitas dan Efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan Pendapatan Daerahnya dan Pertumbuhan Perolehan Pendapatan dan Pengeluaran pada kurun waktu 2012-2013. Penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Kemandirian, Analisis Rasio Efektifitas dan Efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan Pendapatan Daerahnya dan Rasio Pertumbuhan Perolehan Pendapatan dan Pengeluaran. Berdasarkan hasil penelitian pada kurun waktu 2012-2013 Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Kurang baik dengan Rasio Kemandirian sebesar 39,02 artinya bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap sumber dana eksternal sangat tinggi. Efektifitas dan Efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat baik, namun capaian rasio efektifitas dan efisiensi yang baik ini harus dicermati dengan hati-hati. Hal ini dikarenakan belum adanya evaluasi terhadap target yang ditetapkan dalam pendapatan daerah (target mungkin terlalu rendah, presentase biaya pungut yang tetap dan sebagainya). Walaupun efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik tetapi rasio kemandirian masih rendah, maka peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam totalitas pelaksanaan APBD juga rendah.

2.2. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu dasar atau pedoman dalam merencanakan suatu pekerjaan. Kebijakan sering diidentikkan dengan cara bertindak dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah atau pekerjaan yang tidak hanya dapat diimplementasikan di pemerintahan tapi juga dapat di sektor swasta, organisasi maupun individu. Kebijakan sebagai hasil perbuatan atau pemikiran individu memiliki beberapa macam dan ragam kegiatan serta keputusan-keputusan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan terrealisasinya pencapaian tujuan kebijakan dimaksud. Adapun ciri khas yang melekat pada setiap kebijakan yaitu bersifat dinamis (dynamic concept).

H. Hugh Heglo dalam Abidin (2012:6) dengan pendapatnya menyatakan bahwa kebijakan hadir dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kebijakan tidak hanya sekedar rumusan kata-kata dalam melaksanakan suatu pekerjaan tapi terlebih kepada analisis dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut pendapat Woyowasito (2003 : 35) mendefinisikan kebijakan sebagai keterampilan, kemampuan, kecakapan, dan kemampuan memahami sesuatu.

Adapun tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn (2003 : 132) meliputi :

1. *Penyusunan Agenda*, merupakan sebuah proses awal dalam merencanakan suatu kebijakan. Dalam proses inilah dilakukan analisis terhadap masalah atau prioritas dalam suatu pekerjaan sehingga masalah tersebut akan menjadi prioritas baik dalam hal sumberdaya maupun tahap pelaksanaan.

2. *Formulasi Kebijakan*, yaitu setiap masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan untuk selanjutnya dicari solusi pemecahannya dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.
3. *Legitimasi Kebijakan*, yaitu pemberian otorisasi pada proses dasar pemerintahan dalam penerapan kebijakan yang diambil.
4. *Evaluasi Kebijakan*, yaitu penilaian atas kebijakan yang diambil mencakup substansi kebijakan, implementasi kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan yang ada.

2.3. Implementasi Kebijakan

Metode implementasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program karena tidak semua kebijakan yang telah direkomendasikan akan memberikan kepastian keberhasilan suatu program tapi membutuhkan metode penerapan yang pas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi baik ditingkat individu maupun kelompok. Difase ini peran pimpinan sangat penting untuk memberikan motivasi dan integritasnya sebagai pimpinan untuk mengawal jalannya suatu program.

Keberhasilan implementasi atas suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor atau variabel, dimana setiap variabel yang ada saling berkaitan satu dengan lainnya. Menurut Edwards III ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan dalam penerapannya yang satu dengan lainnya saling memiliki keterikatan yaitu :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor kunci dalam mengerjakan suatu program atau tugas. Dibutuhkan komunikasi timbal balik antara atasan dan bawahan tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan terkait sasaran dan apa yang sebenarnya dikejar dalam melaksanakan tugas tersebut. Komunikasi juga sebagai media untuk mengurangi terjadinya kesalahan ataupun penyimpangan dalam melaksanakan tugas.

2. Karakteristik Individu

Meskipun pekerjaan telah dikomunikasikan secara jelas dan terstruktur namun tanpa adanya kompetensi dari pegawai tersebut disertai sarana dan prasarana yang kurang memadai juga akan mempengaruhi keberhasilan suatu program. Hal ini dapat menyebabkan pekerjaan tidak memberikan hasil yang efektif dikarenakan pegawai tersebut tidak memiliki sumberdaya yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya.

3. Disposisi

Para pegawai dituntut untuk memiliki komitmen, kejujuran, bertanggung jawab, loyalitas dan sifat demokratis dalam melaksanakan tugasnya..

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam hal structural pekerjaan. Structural yang gemuk dan Panjang akan berdampak pada rumitnya jalur koordinasi dan fungsi pengawasan. Struktur organisasi sebagai bentuk koordinasi antara bawahan kepada pimpinan yang Panjang dan berbelit belit akan mempengaruhi efektifitas dalam melaksanakan pekerjaan sehingga dibutuhkan susunan personalia yang sesuai kebutuhan organisasi.

Dalam pemerintahan, system politik yang diterapkan umumnya dikoordinasikan dari pusat menuju daerah melalui badan-badan organisasi yang dibentuk untuk menunjang jalannya pemerintahan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Badan-badan tersebut bekerja secara rutin dan kontinyu dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah direkomendasikan dan ditetapkan.

Meter dan Horn, menuturkan bahwa dalam hal kinerja implementasi kebijakan ada lima hal yang berpengaruh diantaranya :

1. Standar dan sasaran kebijakan

Dalam menentukan pekerjaan dibutuhkan standar dan sasaran yang jelas serta terukur karena tanpa adanya sasaran yang jelas akan memberikan multi implementasi dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan tersebut yang akan berdampak pada kurang efektifnya hasil yang akan dicapai..

2. Sumber daya

Peleksanaan suatu pekerjaan dibutuhkan dukungan dari sumberdaya, sumberdaya manusia secara khusus serta sumberdaya lain yang dianggap dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan.

3. Hubungan antar organisasi

Dalam melaksanakan sutau pekerjaan dibeberapa kondisi organisasi membutuhkan bantuan dari pihak-pihak luar untuk seperti dukungan dan koordinasi maupun pengawasan. Untuk itu penting bagi organisasi untuk menjalin komunikasi dan hubungan dengan organisasi lain.

2.4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu indikasi penting dalam pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola sebaik mungkin untuk menjamin jalannya roda pemerintahan yang jujur dan transparan. Oleh karena itu pegawai dituntut mampu bekerja secara jujur dan transparan. Tidak hanya itu, dibutuhkan pula kebijakan dan aturan yang jelas untuk mengawasi dan menontrol pengelolaan keuangan daerah. Menurut World Bank (2013:46) disebutkan bahwa demi mencapai visi misi serta tujuan daerah maka diperlukan relokasi anggaran dan Kelola keuangan yang diimplementasikan diimplementasikan melalui beberapa prinsip penting seperti komprehensif dan disiplin, akuntabilitas, kejujuran, transparansi, fleksibilitas, terprediksi dan informatif.

Mamesah (2013 : 16) dengan pendapatnya menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan segala bentuk baik berupa uang dan barang yang belum dimiliki oleh negara atau pihak lain yang kedudukannya lebih tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu juga segala bentuk lain baik berupa hak dan kewajiban dimana hal tersebut dapat dinilai dengan uang maka hal tersebut juga termasuk sebagai keuangan negara

Dalam mengelola keuangan daerah seharusnya penyelenggara pemerintahan mampu mengelola dengan memegang prinsip-prinsip sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengelola keuangan daerah masyarakat juga memiliki

hak dasar akan hal tersebut. Sesuai yang dikemukakan oleh Waluyo (2012 : 223) yang dijabarkan dibawah ini :

1. Hak untuk mengetahui (*right to know*), dimana masyarakat berhak untuk tahu dan mehamai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah beserta alasan mengapa kebijakan tersebut diambil.
2. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dimana masyarakat berhak untuk diberi penjelasan terkait masalah-masalah tertentu dimana hal tersebut mendapat banyak perdebatan dan disampaikan secara terbuka.
3. Hak untuk didengar pendapat dan aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*).

Waluyo (2012 :218), dengan pendapatnya menyatakan bahwa ada tiga siklus pokok yang meliputi dalam hal mengelola keuangan daerah sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pada proses merencanakan kegiatan, pemerintah daerah dan DPRD pertamanya harus menampung aspirasi masyarakat sebagai input yang untuk menentukan prioritas program yang mereka realisasikan dengan mempertimbangkan Standar Analisis Biaya (SAB) dimana hal tersebut merepresentasikan dari visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang telah direncanakan tadi telah termasuk anggaran yang dibutuhkan

Kemudian pada tahap pelaksanaan, anggaran yang telah diusulkan tadi merefleksikan anggaran berdasarkan kinerja. Pada tahap ini input yang digunakan adalah APBD yang telah disepakati bersama dimana setiap pengeluaran dicatat melalui kuitansi yang akan menjadi dasar laporan pertanggung jawaban kepala daerah baik pertanggung jawaban triwulan, semester atau pertahun dan jika memungkinkan pertanggung jawaban perbulan.

Kemudian proses selanjutnya adalah laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban kepala daerah disampaikan kepada DPRD kemudian dievaluasi secara bersama dan hasil evaluasi akan dikemukakan pada rapat paripurna DPRD.

2.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan daerah tahunan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena APBD merupakan sarana atau media untuk merepresentasikan kebutuhan publik yang dituang dalam beberapa program dan kegiatan yang diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan dan penetapan APBD setiap tahunnya harus merancang suatu program atau perencanaan yang benar-benar atas kepentingan dan kebutuhan publik atas dasar potensi yang dimiliki daerah tersebut. Selanjutnya pelaksanaan atas perencanaan yang telah ditetapkan secara bersama diharapkan dapat dijalankan sebagaimana

mestinya sehingga capaian atas perencanaan tersebut dapat didapatkan dan hasilnya dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya. Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu :

a. Prinsip-prinsip Penyusunan Anggaran Daerah, yang meliputi :

1) Keadilan Anggaran

Pemerintah daerah dalam Menyusun anggaran daerah haruslah berprinsip keadilan. Keadilan merupakan aspek paling penting dalam pengambilan kebijakan terlebih apabila dalam penyusunan anggaran daerah. Dengan menerapkan prinsip keadilan maka pelayanan akan semakin meningkat dan yang juga akan berdampak pada bertambahnya lapangan kerja namun hal itu harus dibarengi dengan distribusi dan alokasi dana yang baik. Hal ini dapat diterapkan melalui alokasi belanja yang sesuai kebutuhan masyarakat, perpajakan dan system retribusi yang adil dan transparan serta pengawasan anggaran sesuai yang telah disepakati bersama.

2) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran harus mampu Menyusun anggaran agar dapat dimaksimal mungkin sehingga akan memberikan dampak yang baik serta pelayanan yang baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini hambatan yang didapatkan pemerintah dalam pelaksanaannya adalah keterbatasan pemerintah dalam menentukan pokokprogram kerja berdasarkan kinerja namun dalam

implementasinya justru melakukan pendekatan incremental dimana hal tersebut sangat lemah terkait landasan pertimbangannya.

3) Anggaran Surplus dan Defisit

Pada dasarnya anggaran surplus dan deficit digunakan untuk menghindari terjadinya pengeluaran yang melebihi penerimaan. Pengeluaran yang melebihi penerimaan harus dapat ditaktisi secara strategis melalui pinjaman daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip deficit anggaran. Penerimaan yang telah ditetapkan pada APBD seringkali tidak mampu memenuhi pengeluaran sehingga hal ini sangat penting bagi pemangku kebijakan dalam mengelola keuangan dalam hal ini anggaran agar kegiatan dapat dilanjutkan. Prinsip anggaran surplus dan deficit ini diharapkan mampu memberikan perhitungan terkait kondisi realistis penerimaan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan keuangan, maupun pinjaman daerah. Di satu sisi, penerimaan yang melebihi target tentunya akan menjadi sumber penerimaan pembiayaan pada tahun berikutnya sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

4) Disiplin Anggaran

Penyusunan anggaran harus disusun seefisien mungkin dan diperlukan pengawasan atas implemmtasi perencanaan tersebut., tidak diperkenankan melakukan pengeluaran belanja pada suatu kegiatan dimana belum ada pengalokasian anggaran pada APBD. Pengalokasian anggaran telah ditetapkan dan disetiap anggaran telah diberi kode rekening sehingga dalam penegluaran tidak boleh melebihi batas anggaran sesuai kode rekening yang telah ditetapkan. Prioritas

penganggaran harus dialokasikan pada program atau kegiatan yang berdasarkan memberikan pelayanan pada masyarakat. Dengan itu dapat meminimalisir penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien yang justru dapat mengurangi resapan substansi suatu kegiatan yang jika dibiarkan akan memberikan efek domino pengeluaran yang tidak perlu.

5) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Dalam hal penganggaran pemerintah daerah harus memberikan transparansi dan akuntabilitas terhadap suatu kegiatan mulai dari proses penyusunan, penetapan, perubahan dan perhitungan anggaran suatu kegiatan, hal ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran. Dalam proses pelaksanaan penganggaran sebagai bentuk implementasi suatu program atau kegiatan maka publik berhak mendapatkan informasi dan dapat mengakses informasi dengan leluasa sebagai bentuk control penganggaran dan kinerja serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dalam suatu kegiatan. Maka dari itu pemerintah daerah dalam hal anggaran harus menyediakan informasi seakurat mungkin, tepat waktu dan dapat diakses seakurat mungkin baik oleh masyarakat, pemerintah pusat, dan semua pihak terkait dalam format yang akomodatif sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian anggaran daerah. Berdasarkan hal tersebut maka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan suatu program atau kegiatan mampu dipertanggung jawabkan baik secara teknis dan ekonomis dan dilaksanakan secara terbuka baik kepada pihak legislative,

masyarakat serta semua pihak terkait yang sifatnya independen yang membutuhkan informasi tersebut.

b. Proses Penyusunan APBD

Dalam menyusun APBD Kabupaten Pinrang yang diawali dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD, Kepala Daerah selanjutnya menerbitkan Surat Edaran perihal Pedoman Penyusunan RKA – SKPD dan RKA – PPKD. Berdasarkan RKA – SKPD dan RKA – PPKD yang telah disusun dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), TAPD menyusun Rancangan APBD dan selanjutnya Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam hal mengelola keuangan daerah aparatur pemerintah daerah dituntut agar mampu bekerja secara efektif dan efisien apalagi dalam melaksanakan otonomi daerah. Kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dinilai melalui kinerja yang memberikan melalui hasil yang mereka berikan dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka. Kinerja yang mereka hasilkan merupakan hasil implementasi kemampuan serta perilaku mereka, dukungan dan dorongan dari lingkungan kerja serta usaha mereka dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka. Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai seberapa baik kinerja aparatur

pemerintah daerah dengan melihat efisiensi dan efektifitas atas pekerjaan mereka tersebut.

2.6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan

Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dana tau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dana tau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat satu hari kerja. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut.

2.7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja

a. Penyusunan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA -SKPD)

Setelah APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, PPKD bersama Kepala SKPD menyusun rancangan DPA – SKPD yang merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut serta rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan. DPA-SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran setelah disahkan oleh PPKD.

b. Anggaran Kas

Berdasarkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun, kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas yang diserahkan kepada PPKD selaku BUD. Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Anggaran kas merupakan dasar pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD).

c. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPD digunakan sebagai penyedia dana untuk setiap SKPD dalam suatu periode. Dalam SPD memuat informasi terkait alokasi-alokasi tiap kegiatan tapi tiap kegiatan tidak harus dibuatkan SPD secara tersendiri.

d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut atau bendahara sebagai dasar untuk pengajuan permintaan pembayaran. SPP diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD yang telah diterbitkan. Surat Permintaan Pembayaran sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM).

e. Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen sebagai syarat untuk diterbitkannya SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Dokumen ini dikeluarkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. SPM dikeluarkan setelah SPP dinyatakan lengkap dan sah selanjutnya kuasa anggaran atau pengguna anggaran berhak mengeluarkan SPM tersebut. Setelah SPM dinyatakan lengkap dan sah selanjutnya ditanda tangani barulah SPM diserahkan kepada otoritas yang berwenang melakukan pencairan dalam hal ini yaitu BUD. Atas dasar hal inilah diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

SP2D yaitu dokumen dalam hal ini digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM). SP2D dikeluarkan setelah pengguna anggaran mengajukan penggunaan anggaran selanjutnya diteliti kelengkapan dokumen SPM. Setelah dokumen dianggap lengkap maka SP2D dikeluarkan oleh kuasa BUD. Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan untuk mengontrol anggaran agar pengeluaran memenuhi aturan sesuai perundang-undangan dan pengeluaran tidak melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan.

g. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) merupakan dokumen yang menggambarkan realisasi penerimaan oleh Bendahara Penerimaan dan realisasi pengeluaran belanja oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan DPA-SKPD. SPJ yang

dibuat oleh Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran ada 2 (dua) yaitu SPJ Fungsional yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan SPJ Administratif yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD pada setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2.8. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi :

a. Regulasi

Regulasi merupakan pemahaman responden terkait adanya peraturan yang berubah baik peraturan maupun perundang-undangan dan perubahan tersebut terdapat perubahan yang signifikan terhadap peraturan yang sebelumnya dan terjadi dalam waktu yang singkat. Dengan peraturan yang seringkali berubah membuat para pegawai kesusahan dalam melaksanakan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab mereka terutama dalam hal mengelola keuangan daerah.

b. Komitmen

Herris B. Simandjuntak (2013 : 1) dalam pendapatnya menyatakan bahwa komitmen merupakan bentuk tanggung jawab seseorang terhadap kesanggupannya

untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Sejalan dengan hal tersebut komitmen tidak meemiliki sangkut paut dengan kemampan, tingkat pendidikan dan bakat seseorang. Dengan adanya komitmen yang kuat akan membuat seoarng pegawai akan bekerja secara maksimal dan mengeluarkan seluruh kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya baik secara mental, fisik dan spiritual. Sebaliknya jika seorang pegawai tidak memiliki komitmen yang kuat akan membuat pegawai tersebut mudah menyerah dalam melaksanakan tugas yang akn berdampak terhadap kinerjanya yang buruk.

c. Karakteristik Individu

Karakteristik individu sangat berkaitan dengan sumber daya manusia, dimana memberikan penggambaran mengenai karakter-karakter yang melekat pada seseorang atau individu baik yang bersifat alami maupun yang terbentuk melalui suatu proses.

Wiley (2010 : 3) mendefenisikan bahwa “SDM merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.” Sumberdaya masnuai yang dimiliki oleh organisasi merupakan sumberdaya yang paling vital dalam jalannya roda organsiasi. Sehingga sumberdaya manusia harus disusn sebaik mungkin dan dikelola sebaik mungkin agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam usahnya melaksanakn tugas dan wewenangnya sebagai bentuk upaya mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, karakteristik individu dapat diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki responden, pemahaman tentang tugas pokok dan fungsinya serta kesiapan dalam melakukan perubahan sesuai perkembangan yang terjadi terutama berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan.

d. Perangkat Pendukung

Dalam menjalankan suatu organisasi atau instansi dibutuhkan perangkat pendukung untuk mendukung jalannya roda organisasi sebagaimana fungsinya untuk mempersingkat dan mempermudah suatu pekerjaan agar dalam bekerja dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk menghasilkan suatu produk yang optimal.

Kenneth dan Jane (2013) mendefinisikan perangkat keras sebagai suatu perangkat input, output maupun proses. Beberapa perangkat keras seperti computer, print, dan beberapa perangkat fisik lainnya yang akan menghasilkan suatu produk sebagai bahan informasi bagi organisasi.

Selanjutnya Kenneth dan Jane menuturkan bahwa perangkat lunak merupakan suatu media memproses data yang telah diinput dari hardware yang selanjutnya akan menghasilkan informasi. Selain itu software ini berfungsi untuk mengendalikan hardware dalam mengelola suatu informasi dalam suatu sistem.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Konseptual

Mengacu kepada landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:

Peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sering mengalami perubahan. Pada Tahun 1980 dasar penyusunan APBD dan pengelolaan keuangan daerah menggunakan istilah “MAKUDA” atau singkatan dari Manual Keuangan Daerah. Kemudian pada Tahun 2002 Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tidak berselang lama setelah penerapannya, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2004 diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adanya perubahan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah tentu membawa pengaruh terhadap efektivitas dalam penerapan peraturan tersebut khususnya masalah pengelolaan keuangan daerah. Perubahan peraturan yang begitu cepat malah memberikan dampak psikologis bagi aparat pengelola keuangan baik di

tingkat SKPD maupun SKPKD untuk mempelajari, memahami dan menerapkan peraturan tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah. Ada anggapan bahwa setiap peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah tidak akan bertahan lama dan kemudian akan terbit lagi peraturan pengganti. Sebagai contoh yaitu penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 yang belum terlalu lama diterapkan oleh Pemerintah Daerah kemudian diganti lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Padahal untuk penerapan suatu peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah membutuhkan proses yang cukup lama melalui sosialisasi ataupun bimbingan teknis bagi aparat pengelola keuangan di tingkat pemerintah daerah. Di samping itu ketersediaan aparat atau SDM yang handal dalam pengelolaan keuangan daerah sangat minim. Begitu pula dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum terlalu lama diterapkan kemudian diganti lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adanya perubahan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu dari Kepmendagri 29 Tahun 2002 ke Permendagri 13 Tahun 2006 banyak membawa perubahan dalam tata kelola keuangan daerah meliputi klasifikasi biaya, kode rekening (akun pendapatan, belanja dan pembiayaan), proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan serta pelaporan atau pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Begitu pula dengan

perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ke Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

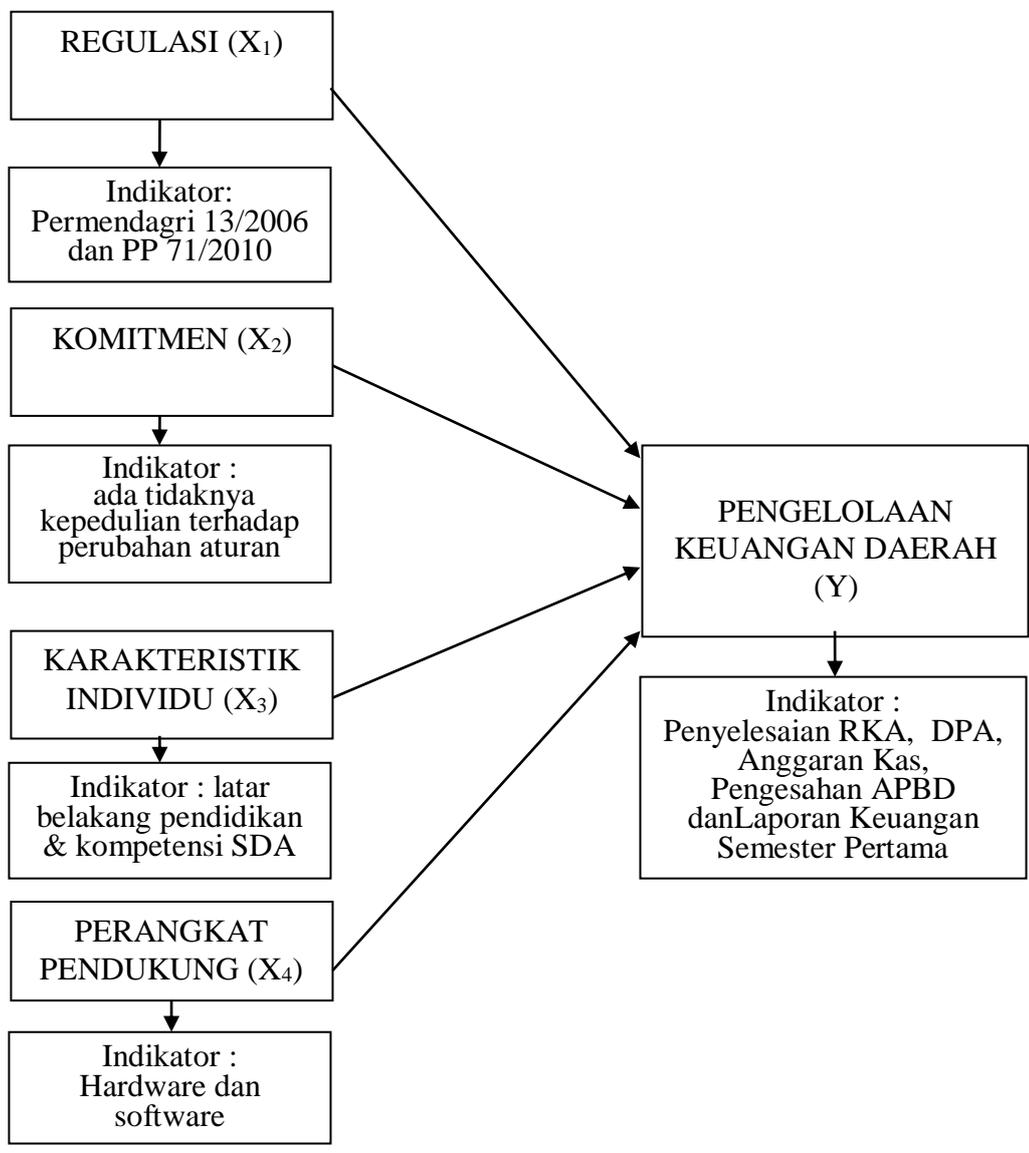
Berdasarkan uraian di atas, peneliti menduga bahwa efektivitas penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga dipengaruhi dengan penyusunan regulasi atau aturan pelaksanaan lebih lanjut oleh pemerintah daerah mengikuti amanah Permendagri 13 Tahun 2006 serta PP 71 Tahun 2010.

Berkaitan dengan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sangat berkaitan erat dengan penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi (IT) merupakan sebuah keniscayaan di era sekarang ini yang mengharuskan percepatan dalam pelayanan dan pembuatan laporan-laporan keuangan yang berbasis akuntansi pemerintahan. Adapun Sistem akuntansi pemerintahan dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan.

Mengacu kepada defenisi di atas, untuk efektivitas pengelolaan sistem akuntansi keuangan daerah tentu harus didukung ketersediaan perangkat pendukung baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) yang memadai.

Begitupula ketersediaan sumber daya aparatur yang cakap dalam menjalankan dan mengoperasikan perangkat-perangkat tersebut.

Karakteristik individu yang berkaitan dengan sumber daya aparatur dan perangkat pendukung seperti tersedianya perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang akan mempercepat proses pengolahan data juga diduga mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah yang tersedia pada jajaran pemerintah daerah kadang tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajarinya atau dengan bidang pekerjaannya, seperti Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – SKPD) yang diharapkan sebagai bagian yang akan terlibat dalam memproses data akuntansi walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, demikian juga dengan staf PPK-SKPD yang ada. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencoba merumuskan kerangka pikir yaitu :



Gambar 3.1.
Kerangka Pikir Penelitian

Adapun indikator untuk setiap variabel independen yaitu :

1. Indikator variabel independen regulasi ((X_1) meliputi pengaruh penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Indikator variabel independen komitmen (X_2) meliputi ada tidaknya kepedulian terhadap implementasi perubahan aturan yang terjadi.
3. Indikator variabel independen karakteristik individu (X_3) meliputi kesesuaian dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi sumber daya aparatur yang tersedia.
4. Indikator variabel independen perangkat pendukung (X_4) meliputi ketersediaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

Sedangkan indikator untuk variable dependen (terikat) yaitu pengelolaan keuangan daerah meliputi penyelesaian RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Anggaran Kas, ketepatan waktu pengesahan APBD serta penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semester I.

3.2. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Regulasi, komitmen, Karakteristik individu dan perangkat pendukung mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

2. Variabel komitmen yang paling dominan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

3.3. Definisi Operasional Variabel

1. Regulasi.

Regulasi adalah perubahan peraturan, keputusan dan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Komitmen.

Komitmen adalah keinginan dari setiap anggota/pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang untuk melakukan perubahan sejalan terjadinya perubahan peraturan perundangan.

3. Karakteristik Individu

Karakteristik Individu adalah kemampuan dari anggota/pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya.

4. Perangkat Pendukung.

Perangkat pendukung adalah ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu pegawai dalam melaksanakan tugas seperti tersedianya komputer dan software yang berkaitan dengan kebutuhan pegawai. Perangkat pendukung ini diukur berdasarkan ketersediaan perangkatnya baik berupa hardware (perangkat keras) maupun software (perangkat lunak) sesuai perkembangan teknologi informasi.

5. Pengelolaan keuangan daerah

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan diukur berdasarkan persepsi responden tentang penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Anggaran Kas, ketepatan waktu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) serta penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semester I.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang, dengan waktu penelitian adalah pada bulan Oktober sampai dengan Nopember 2019.

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survei dengan teknik analisis korelasional untuk mengetahui antara variabel terikat dan variabel bebas. Oleh karena itu variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini tidak direkayasa, dengan kata lain penelitian ini berupa hasil pengisian instrumen di lapangan.

4.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek dan obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:90). Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sejumlah 30 orang dari 66 pegawai yang ada. Adapun alasan peneliti tidak menggunakan semua pegawai yang ada sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa ada beberapa pegawai sesuai pengamatan peneliti tidak memahami implementasi pengelolaan keuangan daerah sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan

perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan karena penempatannya tidak berkaitan langsung dengan tata kelola keuangan daerah. Peneliti mengambil sampel dari para pemangku eselon III dan IV serta beberapa staf pada 4(empat) bidang yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Pembiayaan, Bidang Asset dan Bidang Akuntansi serta dari Sekretariat Badan Keuangan Daerah dan ditambah beberapa staf di setiap bidang dan sekretariat yang dianggap memahami tata kelola keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011:91). Penentuan sampel dengan teknik sampling jenuh (sensus) dimana semua populasi dijadikan sampel, sehingga sampel sebanyak 30 orang pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Daftar Pertanyaan (*quesioner*)

Metode ini menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis guna memperoleh data, sehingga dihasilkan data berupa tanggapan dari responden.

2. Dokumentasi

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan proses pelayanan masyarakat, serta kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh unit pelayanan terpadu, sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

3. Observasi

Adalah pengamatan secara langsung di lapangan berkenaan dengan regulasi, komitmen, Karakteristik individu dan perangkat pendukung serta pengelolaan keuangan daerah perspektif Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak terkait.

4.4. Instrumen Pengumpulan Data

Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Variabel independen (Variabel bebas) dan Variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel regulasi, komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung. Sedangkan variabel terikatnya adalah pengelolaan keuangan daerah perspektif Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun pengukuran masing-masing variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :

1. Regulasi.

Regulasi diukur berdasarkan persepsi responden tentang perubahan peraturan dalam waktu yang singkat dan perubahan peraturan tersebut sangat berbeda dengan

peraturan sebelumnya yang berlaku. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuisisioner. Pemberian skor terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (TT = Tidak Tahu), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

2. Komitmen.

Komitmen diukur berdasarkan persepsi dari responden mengenai keinginan untuk melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara dalam pengelolaan keuangan daerah walaupun peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah sering mengalami perubahan atau revisi. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuisisioner. Pemberian skor terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (TT = Tidak Tahu), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

3. Karakteristik Individu.

Karakteristik individu diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh responden, pemahaman terhadap pelaksanaan tugasnya, kesiapan dalam melakukan perubahan berkaitan proses penyusunan laporan keuangan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dalam bentuk

kuisisioner. Pemberian skor terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (TT = Tidak Tahu), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

4. Perangkat Pendukung.

Perangkat pendukung ini diukur berdasarkan ketersediaan perangkat pendukung dan kemutakhirannya. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuisisioner. Pemberian skor terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (TT = Tidak Tahu), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

5. Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diukur berdasarkan penyelesaian RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), Anggaran Kas, ketepatan waktu pengesahan APBD serta penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semester I. Pemberian skor terhadap pertanyaan yang diajukan yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (TT = Tidak Tahu), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

4.5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini nantinya akan diolah melalui prosedur sebagai berikut : Pengolahan secara manual dengan melakukan editing atau memperjelas data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, yang kemudian ditabulasikan sesuai dengan data variabel untuk memudahkan proses pengolahan data pada tahap berikutnya. Akhirnya pengolahan data terakhir dengan menggunakan komputer berdasarkan model analisis dengan menggunakan program SPSS. 12. Sebelum dianalisis lebih jauh maka, terlebih dahulu dilakukan uji instrumen penelitian sebagai berikut :

Uji validitas mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dengan kata lain bahwa tes atau instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran (Azwar, 2012 : 5). Dalam penelitian ini penulis melakukan uji validitas internal yaitu sejauhmana perbedaan yang sesungguhnya diantara responden yang diteliti. Untuk itu akan dilakukan dengan analisis item dengan menggunakan metode korelasi *Product Moment Pearson* yaitu mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Hasil korelasi tersebut harus signifikan berdasarkan ukuran statistik tertentu. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara fungsi item dengan fungsi ukur secara keseluruhan atau instrumen tersebut valid. Selain valid, maka instrumen penelitian juga harus reliabel (dapat diandalkan). Instrumen tersebut mempunyai

hasil yang konsisten, dengan demikian maka instrumen ini dapat dipakai dengan aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda dan kondisi yang berbeda pula (Cooper dan Emory, 2012 : 164). Dengan kata lain bahwa reliabilitas menunjukkan sejauhmana pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Dalam penelitian ini akan dilakukan uji reliabilitas konsistensi internal dengan menggunakan koefisien Alfa Cronbach (α). Suatu instrumen dapat disebut reliable apabila lebih besar dari 0,60 (Nunnally dalam Zeithhaml, Berry b dan Parasuraman 2012).

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*). Pengujian dilakukan secara parsial dan secara simultan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dan diolah melalui program aplikasi komputer SPSS.15.0 Adapun model analisis dari Regresi Berganda (Sugiono, 2011:205) yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e_i$$

Dimana :

Y = Pengelolaan Keuangan Daerah

X₁ = Regulasi

X₂ = Komitmen

X₃ = Karakteristik individu

X₄ = Perangkat pendukung

β_0 = Intercept

β_1 , dan β_2 = Koefisien regresi

e_i = Faktor Pengganggu (*random error*).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Letak Geografis

Kabupaten Pinrang dengan ibukota Pinrang terletak disebelah 185 km utara ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 4°10'30" sampai 30°19'13" lintang selatan dan 119°26'44" sampai 119°47'20" bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa.

Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat dengan Propinsi Sulawesi Barat, sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km².

Kondisi Topografi wilayah pada umumnya berbukit-bukit dengan ketinggian 100 – 2000 meter di atas permukaan laut. Iklim di Kabupaten ini adalah tropis dengan suhu udara rata-rata mencapai 28°C dengan curah hujan rata-rata mencapai 174,93 mm/bln. Jumlah penduduk pada tahun 2003 sebesar 322.429 jiwa yang terdiri atas 155.192 jiwa laki-laki atau 48,13% dan 167.237 jiwa perempuan atau 51,87% dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 164,36 jiwa/km².

B. Gambaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang

Dasar pembentukan Organisasi sebelumnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan & Asset Daerah Kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah (PERDA) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, kemudian diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal tersebut merubah Nomenklatur SKPD Dinas PPKAD menjadi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan pada prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Aspek Strategis Organisasi Secara geografis wilayah Kabupaten Pinrang terletak pada 30, 19', 13" sampai 40, 10', 30" lintang selatan dan 119, 26', 30" sampai dengan 119 0, 47', 20" bujur timur yang terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan dan arah selatan ke utara berjarak 187km dari Ibu Kota propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah daratan adalah 1.961,77 km² atau sekitar 31% dari luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Selatan yang terbagi di dalam 12 wilayah kecamatan dan terdiri dari 69 Desa, 39 Kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar ±400.853 jiwa sesuai dengan data Disduk capil persemester I tahun 2018. Sedangkan dilihat dari besarnya jumlah penduduk Kabupaten Pinrang tersebut yang tersebar di seluruh wilayah, maka perlu didukung jumlah aparatur yang memadai baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun dari kemampuan sumber daya manusia, guna mendukung kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

1. Permasalahan umum yang sedang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

- a. Belum optimalnya Aparat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
- b. Porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan masih tergolong rendah
- c. Belum optimalnya penegakan perangkat peraturan tentang pajak daerah dan retribusi
- d. Masih Banyak Potensi Pendapatan yang belum dapat di ambil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Masih banyaknya objek pajak daerah yang tidak mencerminkan Nilai Objek Pajak (NJOP) yang real
- f. Pemda belum dapat memenuhi tuntutan pusat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengalokasikan Belanja Langsung dalam porsi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung
- g. Belum maksimalnyastandar operasional prosedur yang baku yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam pengelolaan organisasi dalam melakukan tugas berdasarkan kewenangan yang dimiliki setiap SKPD
- h. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang menunjang dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan

Visi badan keuangan daerah kabupaten Pinrang mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan, yang sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pematapan

penyelenggaraan sistem pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan daerah yang diwujudkan dalam visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang 2014–2019 yaitu: “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel Dan Professional serta Meningkatnya Pendapatan Daerah sebagai Penyangga Pembangunan Kabupaten Pinrang Menuju Masyarakat yang Maju dan Sejahtera”

Makna dan kriteria yang terkandung dari visi Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Akuntabel atau akuntabilitas (pertanggung jawaban) dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.
2. Profesional merupakan seorang yang dapat melaksanakan suatu pekerjaan didalam dirinya memiliki sifat-sifat seperti kemampuan, kemahiran, teknis pekerjaan dan lain-lain sebagai bentuk integritasnya terhadap dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Seorang profesional haruslah memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
 - a. Skill, yaitu keahlian seseorang terhadap suatu bidang dan dapat dibuktikan melalui kinerja yang mereka berikan dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepada mereka.
 - b. Knowledge, yaitu ilmu dan pengetahuna seseorang terhadap suatu bidang , setidaknya tahu akan wawasan pekerjaan yang dikerjakannya sehingga

mampu mengatasi masalah yang dapat muncul dalam melaksanakan tugasnya.

- c. Attitude, dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dibutuhkan tidak hanya pintar dan cerdas tapi juga membutuhkan sikap atau attitude yang baik untuk menunjang dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Maju dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana kondisi yang ada semakin baik dan sempurna.
4. Sejahtera, dalam hal ini dapat dilihat melalui keadaan masyarakat yang hidup dalam damai, sehat, makmur.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang mengupayakan langkah – langkah strategis yang diformulasikan kedalam misi. Misi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang beriman, bertaqwa, dan berwawasan kebangsaan.
2. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan bertanggung jawab dengan pemanfaatan IPTEK, dan sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan kapasitas SDM pada Badan Keuangan Daerah yang solid, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, inovatif, dan taat azaz.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah Keuangan menjadi tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati kepadanya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
4. Pengelolaan administrasi umum ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis badan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, maka Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
3. Bidang Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah;
 - b. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah.
4. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pemanfaatan Asset;
 - c. Sub Bidang Pendataan dan Penghapusan.
5. Bidang Pembiayaan terdiri dari
 - a. Sub Bidang Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan.
6. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Verifikasi;
 - b. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
 - c. Sub Bidang Monitoring Keuangan dan Evaluasi.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)Badan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

5.1.2. Identitas Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 30 orang responden pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam metode penelitian, maka diperoleh beberapa karakteristik-karakteristik secara umum yaitu bahwa dari 30 orang responden tersebut sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 20 orang atau 67,31 persen dan sisanya sebanyak 10 orang atau sekitar 32,69 persen yang berjenis kelamin perempuan.

Untuk lebih jelasnya perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1.
Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	20	67,31
2.	Perempuan	10	32,69
	Total	30	100,00

Sumber : Survei Tahun 2019

Tabel berikut ini akan memperlihatkan sebaran responden menurut kelompok umur yang ada pada Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

Tabel 5.2.
Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 35	3	9,62
2.	35 – 40	6	17,31
3.	41 – 45	8	19,23
4.	46 – 50	18	40,38
5.	> 50	3	13,46
	Total	30	100,00

Sumber : Survei Tahun 2019

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah antara umur 46 - 50 tahun dengan jumlah 21 orang responden atau sekitar 40,38 persen, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu antara umur dibawah 35 tahun yang hanya berjumlah 5 orang atau 9,62 persen saja. Adapun dari pengelompokan responden menurut umur maka umur termuda adalah 24 tahun dan umur tertua adalah 52 tahun.

Sebaran responden menurut masa kerjanya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.3.
Sebaran Responden Menurut Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 10	6	23,08
2.	10 – 15	3	9,62
3.	16 – 20	18	40,38
4.	21 – 25	10	26,92
	Total	30	100,00

Sumber : Survei Tahun 2019

Apabila dilihat dari masa kerja pegawai pada Pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang maka pegawai yang paling lama masa kerjanya adalah 25 tahun, sedangkan masa kerja yang paling sedikit adalah 3 tahun. Dilihat dari distribusi responden menurut masa kerjanya maka masa kerjanya yang paling banyak jumlahnya yaitu 21 orang responden atau 40,38 persen adalah antara 16 sampai 20 tahun. Adapun masa kerja yang paling sedikit jumlahnya yaitu hanya terdapat 5 orang responden atau 9,62 persen saja adalah antara 10 sampai 15 tahun.

Berdasarkan uraian dan tabel distribusi frekuensi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat diperoleh gambaran tentang profil dari responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

5.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan melalui pengumpulan jawaban yang diperoleh dari responden maka diperoleh informasi kongkrit tentang variabel-variabel penelitian yang dimaksud terdiri atas:

1. Regulasi (X_1)

Gambaran distribusi frekuensi regulasi dapat diurai pada tabel berikut :

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Regulasi

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Perubahan peraturan dalam	0	0	10	33,34	11	36,66	9	30,00	0	0

	yang relatif singkat sangat memacu saya untuk mempelajari dan memahaminya											
2.	Perubahan peraturan yang relatif cepat, sangat membebani saya dalam melaksanakan tugas saya	4	13,33	3	10,00	13	43,34	6	20,00	4	13,33	
3.	Permendagri 13 tahun 2006 dan PP 24 tahun 2005 memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangan, hal ini sangat menyulitkan saya dalam membuat laporan	1	3,33	5	16,67	8	26,67	6	2,00	10	33,34	
4.	Kode perkiraan yang begitu banyak dan berbeda dengan peraturan sebelumnya menyulitkan saya dalam menyusun RKA SKPD	4	13,33	6	2,00	7	23,33	7	23,33	6	2,00	
5.	Saya kesulitan dalam menyusun indikator kinerja dalam menyusun RKA	1	3,33	4	13,33	6	2,00	10	33,33	9	30,00	

Sumber : Data Primer Diolah (Lampiran 3)

Keterangan : Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-ragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju

Berdasarkan Tabel 5.4, Perubahan peraturan dalam yang relatif singkat sangat memacu saya untuk mempelajari dan memahaminya dimana 0% responden

menyatakan sangat setuju, 30,00% responden menyatakan setuju, kemudian 36,66% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 33,34% responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris kedua berupa Perubahan peraturan yang relatif cepat, sangat membebani saya dalam melaksanakan tugas saya, dimana 13,33% responden menyatakan sangat setuju, 20,00% responden menyatakan setuju, 43,34% responden menjawab ragu-ragu, 10,00% responden menjawab tidak setuju dan 3,33% responden menyatakan sangat tidak setuju.

Pada item empiris ketiga Permendagri 13 tahun 2006 dan PP 71 tahun 2010 memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangan, hal ini sangat menyulitkan saya dalam membuat laporan, dimana 33,34% responden menyatakan sangat setuju, 2,00% responden menyatakan setuju, kemudian 26,67% responden menjawab ragu-ragu, serta 16,67% menyatakan tidak setuju dan 3,33% responden menyatakan sangat tidak setuju.

Pada item empiris keempat yaitu Kode perkiraan yang begitu banyak dan berbeda dengan peraturan sebelumnya menyulitkan saya dalam menyusun RKA SKPD, dimana 2,00% responden menyatakan sangat setuju, 23,33% responden menyatakan setuju, kemudian 23,33% responden menjawab ragu-ragu, 2,00% responden yang menyatakan tidak setuju serta 13,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris kelima Saya kesulitan dalam menyusun indikator kinerja dalam menyusun RKA , dimana 30,00% responden menyatakan sangat setuju,

33,33% responden menyatakan setuju, 2,00% responden menjawab ragu-ragu, 13,33% responden menjawab tidak setuju dan 3,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

2. Komitmen (X₂)

Gambaran distribusi frekuensi Komitmen dapat diurai pada tabel berikut :

Tabel 5.5.
Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Komitmen

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Saya merasa bangga jika dapat melakukan perubahan atau perbaikan demi terciptanya good governance	6	2,00	11	36,67	7	23,00	5	16,67	1	3,33
2.	Saya peduli dengan perubahan yang harus dilakukan	2	6,67	4	13,33	9	30,00	9	30,00	6	2,00
3.	Saya enggan untuk mempelajari peraturan yang baru, karena saya yakin peraturan tersebut akan berubah lagi dalam waktu yang relatif singkat	1	3,33	2	6,67	11	36,67	11	36,67	5	16,67

4.	Saya akan berusaha untuk melakukan perubahan dan melakukan yang terbaik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa	4	13,33	7	23,33	8	26,67	8	26,67	3	10,00
----	--	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Keterangan : Skor 1 = Sangat Tidak Setuju, Skor 2 = Tidak Setuju, Skor 3 = Ragu-ragu, Skor 4 = Setuju, dan Skor 5 = Sangat Setuju

Berdasarkan Tabel 5.5., Saya merasa bangga jika dapat melakukan perubahan atau perbaikan demi terciptanya good governance, dimana 3,33% responden menyatakan sangat setuju, 16,67% responden menyatakan setuju, kemudian 23,00% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 36,67% responden yang menyatakan tidak setuju serta 2,00% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris kedua berupa Saya peduli dengan perubahan yang harus dilakukan, dimana 2,00% responden menyatakan sangat setuju, 30,00% responden menyatakan setuju, kemudian 30,00% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 13,33% responden yang menyatakan tidak setuju serta 6,67%. responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris ketiga Saya enggan untuk mempelajari peraturan yang baru, karena saya yakin peraturan tersebut akan berubah lagi dalam waktu yang relatif singkat, 16,67% responden menyatakan setuju, kemudian 36,67% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 6,67% responden yang menyatakan tidak setuju serta 3,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris keempat berupa Saya akan berusaha untuk melakukan perubahan dan melakukan yang terbaik agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dimana 10,00% responden menyatakan sangat setuju, 26,67% responden menyatakan setuju, kemudian 26,67% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 23,33% responden yang menyatakan tidak setuju serta 13,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

3. Karakteristik Individu (X₃)

Gambaran distribusi frekuensi Karakteristik Individu dapat diurai pada tabel berikut :

Tabel 5.6.

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Karakteristik Individu

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Penempatan pegawai tidak didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai.	1	3,33	4	13,33	5	16,67	9	30,00	11	36,67
2.	Pegawai yang ditempatkan kurang memahaminya pekerjaannya	1	3,33	1	3,33	12	4,00	11	36,67	4	13,33
3.	Pegawai yang ada tidak siap untuk melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan	1	3,33	0	0	4	13,33	10	33,34	15	50,00

4.	Pegawai memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah	5	16,67	0	0	12	40,00	8	26,67	5	16,67
5.	SKPD tidak memiliki SDM yang mampu dalam laporan keuangan per SKPD.	1	3,33	0	0	7	23,33	13	43,33	8	26,67

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Keterangan : Skor 1 = Sangat Tidak Setuju, Skor 2 = Tidak Setuju, Skor 3 = Ragu-ragu, Skor 4 = Setuju, dan Skor 5 = Sangat Setuju

Berdasarkan Tabel 5.6, unsur item empiris pertama Penempatan pegawai tidak didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai, dimana 36,67% responden menyatakan sangat setuju, 30,00% responden menyatakan setuju, kemudian 16,67% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 13,33% responden yang menyatakan tidak setuju serta 3,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris kedua, Pegawai yang ditempatkan kurang memahami pekerjaannya dimana 13,33% responden menyatakan sangat setuju, 36,67% responden menyatakan setuju, kemudian 4,00% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 3,33% responden yang menyatakan tidak setuju serta 3,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris ketiga Pegawai yang ada tidak siap untuk melakukan perubahan dalam proses penyusunan laporan keuangan, dimana 50,00% responden menyatakan sangat setuju, 33,34% responden menyatakan setuju, kemudian 13,33%

responden menjawab ragu-ragu, kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju serta 3,33%. responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris keempat berupa Pegawai memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana 16,67% responden menyatakan sangat setuju, 26,67% responden menyatakan setuju, kemudian 40,00% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju serta 16,67% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris kelima SKPD tidak memiliki SDM yang mampu dalam laporan keuangan per SKPD, dimana 26,67% responden menyatakan sangat setuju, 43,33% responden menyatakan setuju, kemudian 23,33% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 0% responden yang menyatakan tidak setuju serta 3,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

4. Perangkat Pendukung (X4)

Pada indikator perangkat pendukung dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 5.7

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Pendukung

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Perangkat pendukung kegiatan/pekerjaan seperti komputer cukup banyak	0	0	1	3,33	8	26,67	10	33,33	11	36,67

2.	Perangkat Pendukung kegiatan/pekerjaan seperti komputer tersebut sudah yang terbaru	2	6,67	5	16,67	9	30,00	7	23,33	1	3,33
3.	Sarana pendukung telah memadai	1	3,33	2	6,67	10	33,33	9	30,00	8	26,67
4.	Software yang digunakan mendukung pekerjaan yang dilakukan	1	3,33	5	16,67	9	30,00	10	33,33	5	16,67
5.	Software yang digunakan sangat membantu penyelesaian pekerjaan tepat waktu	1	3,33	5	15,67	12	40,00	8	26,67	4	13,33

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Keterangan : Skor 1 = Sangat Tidak Setuju, Skor 2 = Tidak Setuju, Skor 3 = Ragu-ragu, Skor 4 = Setuju, dan Skor 5 = Sangat Setuju

Berdasarkan Tabel 5.8., Perangkat pendukung kegiatan/pekerjaan seperti komputer cukup banyak, dimana 36,67% responden menyatakan sangat setuju, 33,33% responden menyatakan setuju, kemudian 26,67% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 3,33% responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris kedua Perangkat Pendukung kegiatan/pekerjaan seperti komputer tersebut sudah yang terbaru, dimana 3,33% responden menyatakan sangat setuju, 23,33% responden menyatakan setuju, kemudian 30,00% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 16,67% responden yang menyatakan tidak setuju serta 6,67% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris ketiga Sarana pendukung telah memadai, dimana 26,67% responden menyatakan sangat setuju, 30,00% responden menyatakan setuju, kemudian 33,33% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 6,67% responden yang menyatakan tidak setuju serta 3,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris keempat Software yang digunakan mendukung pekerjaan yang dilakukan, dimana 16,67% responden menyatakan sangat setuju, 33,33% responden menyatakan setuju, kemudian 30,00% responden menjawab ragu-ragu, 16,67% responden menjawab tidak setuju serta 3,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris kelima berupa Software yang digunakan sangat membantu penyelesaian pekerjaan tepat waktu, dimana 13,33% responden menyatakan sangat setuju, 26,67% responden menyatakan setuju, kemudian 40,00% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 15,67% responden yang menyatakan tidak setuju serta 3,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

5. Pengelolaan Keuangan (Y)

Pada indikator kinerja dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 5.8

Distribusi Frekuensi Item-item Variabel Pengelolaan Keuangan

No	Pernyataan	Tingkat Jawaban Responden									
		1		2		3		4		5	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Dalam penyusunan APBD, RKA dapat	0	0	3	10,00	9	30,00	10	33,33	8	26,67

	diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan										
2.	Dalam penatausahaan, DPA dan anggaran Kas dapat dibuat sesuai dengan waktu	0	0	7	23,33	13	43,33	5	16,67	5	16,67
3.	Pengelolaan keuangan daerah telah sesuai standar yang ditetapkan	1	3,33	9	30,00	8	26,67	8	26,67	4	13,33
4.	Keterlambatan APBD disahkan disebabkan SKPD terlambat dalam menyerahkan RKA SKPD	0	0	5	16,67	11	36,67	8	26,67	6	20,00
5.	Laporan keuangan semester 1 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	0	0	6	20,00	14	46,67	9	30,00	1	3,33

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Keterangan : Skor 1 = Sangat Tidak Setuju, Skor 2 = Tidak Setuju, Skor 3 = Ragu-ragu, Skor 4 = Setuju, dan Skor 5 = Sangat Setuju

Berdasarkan Tabel 5.8., Dalam penyusunan APBD, RKA dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan, dimana 26,67% responden menyatakan sangat setuju, 33,33% responden menyatakan setuju, kemudian 30,00% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 10,00% responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris kedua Dalam penatausahaan, DPA dan anggaran Kas dapat dibuat sesuai dengan waktu dimana 16,67% responden menyatakan sangat setuju,

16,67% responden menyatakan setuju, kemudian 43,33% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 23,33% responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris ketiga Pengelolaan keuangan daerah telah sesuai standar yang ditetapkan, dimana 13,33% responden menyatakan sangat setuju, 26,67% responden menyatakan setuju, kemudian 26,67% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 30,00% responden yang menyatakan tidak setuju serta 3,33% responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item pegawai Keterlambatan APBD disahkan disebabkan SKPD terlambat dalam menyerahkan RKA SKPD, dimana 20,00% responden menyatakan sangat setuju, 26,67% responden menyatakan setuju, kemudian 36,67% responden menjawab ragu-ragu, 16,67% responden menjawab tidak setuju serta 0 responden menjawab sangat tidak setuju.

Pada item empiris kelima berupa Laporan keuangan semester 1 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dimana 3,33% responden menyatakan sangat setuju, 30,00% responden menyatakan setuju, kemudian 46,67% responden menjawab ragu-ragu, kemudian 20,00% responden yang menyatakan tidak setuju serta 0% responden menjawab sangat tidak setuju.

5.1.4. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total dari masing-masing atribut, formulasi koefisien yang digunakan adalah *Pearson Product Moment Test* dengan program SPSS Ver. 15.0. seperti yang tampak pada Tabel 5.4. Menurut Sugiyono (2008 : 123), korelasi antara skor total item adalah merupakan interpretasi dengan mengkonsultasikan nilai r kritis. Jika r hitung lebih besar dari r kritis, maka instrumen dinyatakan valid. Dari uji validitas yang dilakukan terhadap skor setiap item dengan skor total dari masing-masing atribut dalam penelitian ini, maka didapatkan hasil seluruh item variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan sah atau valid, dengan nilai *Corrected Item Total Correlation* positif di atas angka 0,30.

Tabel 5.9
Hasil Uji Item Variabel

Variabel	Item	Korelasi Item Total	R Kritis	Keterangan
----------	------	---------------------	----------	------------

pPengelolaan keuangan daerah (Y)	1	0,401	0,30	Valid
	2	0,503	0,30	Valid
	3	0,403	0,30	Valid
	4	0,558	0,30	Valid
	5	0,521	0,30	Valid
Regulasi (X ₁)	1	0,526	0,30	Valid
	2	0,541	0,30	Valid
	3	0,550	0,30	Valid
	4	0,539	0,30	Valid
	5	0,476	0,30	Valid
Komitmen (X ₂)	1	0,459	0,30	Valid
	2	0,582	0,30	Valid
	3	0,614	0,30	Valid
	4	0403	0,30	Valid
Karakteristik individu (X ₃)	1	0,504	0,30	Valid
	2	0,404	0,30	Valid
	3	0,425	0,30	Valid
	4	0,504	0,30	Valid
	5	0.436	0,30	Valid
Perangkat pendukung (X ₄)	1	0,423	0,30	Valid
	2	0319	0,30	Valid
	3	0,526	0,30	Valid
	4	0420	0,30	Valid
	5	0,417	0,30	Valid

Sumber: Lampiran

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dengan internal consistency dilakukan dengan cara menguji instrumen hanya sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsistensi antara item-item dalam suatu instrumen. Tingkat keterkaitan antar

item pertanyaan dalam suatu instrumen untuk mengukur variabel tertentu menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal instrumen yang bersangkutan. Dari hasil pengolahan data, nilai alpha masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 5.10. sebagai berikut :

Tabel 5.10.
Uji Reliabilitas Masing-masing Variabel

Nama Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Pengelolaan keuangan daerah (Y)	0,929	Reliabel
Regulasi (X ₁)	0,884	Reliabel
Komitmen (X ₂)	0,793	Reliabel
Karakteristik individu (X ₃)	0,817	Reliabel
Perangkat pendukung (X ₄)	0,841	Reliabel

Sumber: Lampiran 3

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas dapat diterima dengan menggunakan reliabilitas Cronbach`s Alpha $> 0,60$ (Zeithaml Berry). Hasil pengujian seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan hasil lebih besar dari 60 % (> 60 %), maka pengukuran tersebut dapat diandalkan.

5.1.5. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dari persamaan regresi linear berganda di atas dibuktikan dengan menguji.

1. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidak adanya gejala multikolinearitas dengan menggunakan besaran nilai VIF (*Variance Inflation Factor*)

yang diolah menggunakan alat bantu program analisa data SPSS Ver. 15 dimana nilai VIF dari masing-masing variabel bebas mempunyai nilai diantara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh). Berdasarkan Tabel 5.11. dapat dijabarkan nilai VIF masing-masing variabel sebagai berikut :

Tabel 5.11.

**Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	28.957	5.506		5.259	.000		
	VARIABEL REGULASI (X1)	.094	.159	-.109	.594	.558	.839	1.192
	KOMITMEN (X2)	.427	.244	.364	1.750	.092	.655	1.526
	KARAKTERISTIK -INDIVIDU (X3)	-.387	.323	.246	1.201	.241	.674	1.484
	PERANGKAT-PENDUKUNG (X4)	.489	.214	.441	2.282	.031	.758	1.319

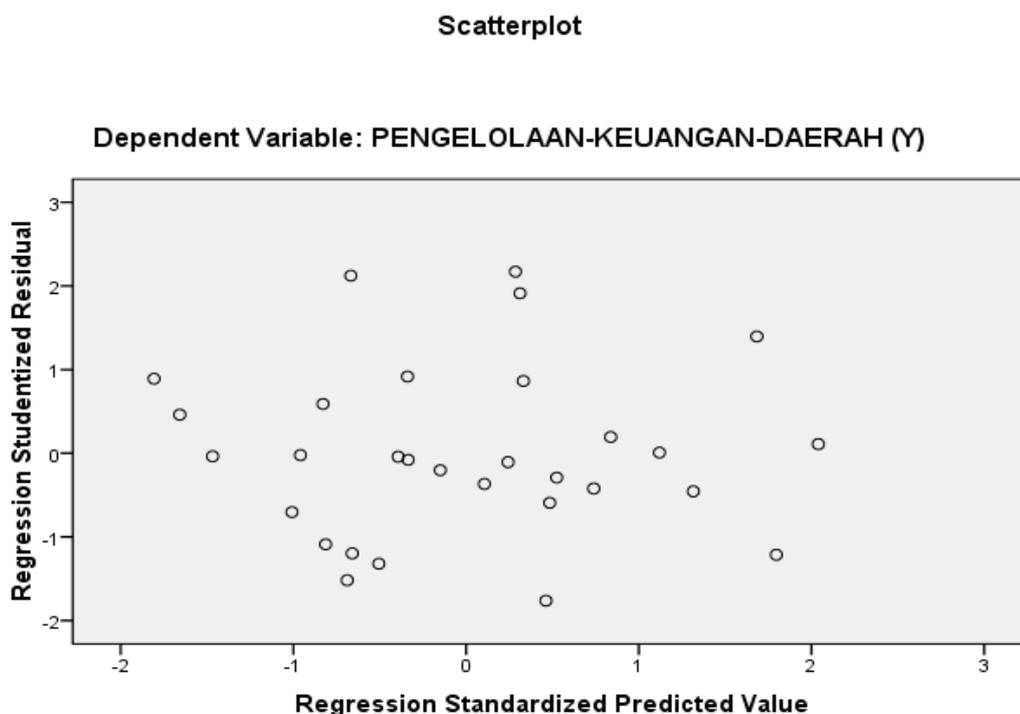
a. Dependent Variable: PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH (Y)

Sumber : Data Diolah, 2019

2. Heterokedastisitas

Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu mempunyai varians yang sama atau tidak. Suatu persamaan regresi dikatakan mempunyai heterokedastisitas apabila dalam hasil pengolahan data menggunakan SPSS ver 15 tidak menggambarkan suatu pola yang sama dan membentuk suatu garis lurus atau bisa dikatakan bersifat homokedastik. Dalam penelitian ini gambar grafik scatter plot dapat ditampilkan dalam gambar 5.1.

Gambar 5.1.
Grafik Scatter Plot



Sumber : Data Diolah, 2019

Dalam penampilan gambar grafik *Scatter Plot* menunjukkan pola penyebaran pada titik-titiknya dan tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga dalam penelitian ini bisa dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas.

3. Autokorelasi

Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana variabel pengganggu pada periode yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan nilai Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini mendekati 2 (dua) maka bisa dikatakan bahwa penelitian ini tidak mengandung autokorelasi. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari analisa pengolahan data menggunakan

SPSS Ver. 15 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berjumlah 1.890 sehingga penelitian ini bisa dikatakan tidak mengandung autokorelasi.

Tabel 5.12

Hasi Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.540 ^a	.291	.178	3.16595	.291	2.566	4	25	.063	1.890

a. Predictors: (Constant), PERANGKAT-PENDUKUNG (X4), VARIABEL REGULASI (X1), KARAKTERISTIK-INDIVIDU (X3), KOMITMEN (X2)

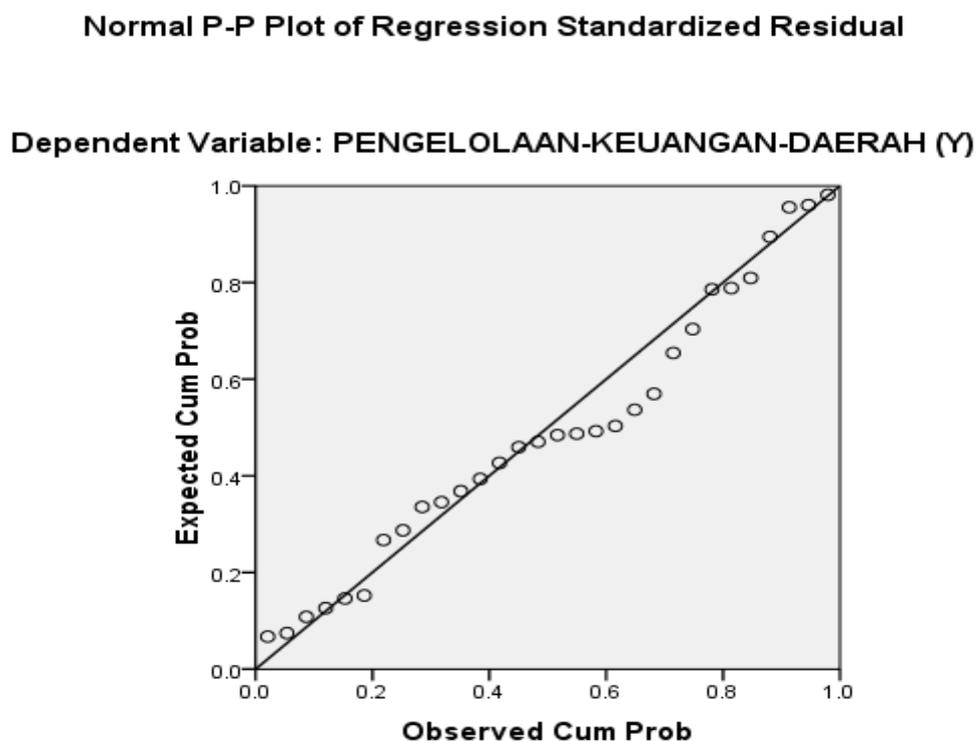
b. Dependent Variable: PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH (Y)

Sumber : Data Diolah, 2019

4. Normalitas

Untuk mengetahui hasil perhitungan bersifat normalitas dapat dilakukan dengan melihat gambar histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini terlihat bahwa untuk pengujian normalitas menunjukkan sifat normal dengan ditampilkannya diagram probability plot yang membentuk pola garis lurus seperti yang terlihat dalam gambar 5.2 berikut ini

Gambar 5.2. Uji Normalitas



Sumber : Data Diolah, 2019

5.1.6. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan asumsi persamaannya sebagai berikut :

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Pengelolaan keuangan daerah

X₁ = Regulasi

X_2 = Komitmen

X_3 = Karakteristik individu

X_4 = Perangkat pendukung

b_0 = Konstanta

b_{1-4} = Koefisien regresi

e = Residual atau random error

Dengan menggunakan alat bantu program analisa data SPSS Ver. 15 maka diperoleh nilai koefisien regresi masing-masing variabel yang meliputi regulasi, komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.13
Hasil Perhitungan Regresi

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
B	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	28.957	5.506		5.259	.000		
	REGULASI (X1)	.094	.159	.109	.594	.558	.839	1.192
	KOMITMEN (X2)	.427	.244	.364	1.750	.092	.655	1.526
	KARAKTERISTIK -INDIVIDU (X3)	.387	.323	.246	1.201	.241	.674	1.484
	PERANGKAT-PENDUKUNG (X4)	.489	.214	.441	2.282	.031	.758	1.319

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH (Y)

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil print out SPSS diperoleh koefisien dalam perhitungan regresi di atas, maka persamaan regresinya menjadi :

$$Y = 28,957 + 0,109X_1 + 0,364X_2 + 0,246X_3 + 0,441X_4$$

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Formulasi regresi linear berganda di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 28,957 mempunyai pengertian bahwa jika skor meliputi regulasi, komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung nilainya tetap/konstan maka peningkatan pengelolaan keuangan daerah mempunyai nilai sebesar 28,957.
2. Nilai koefisien regresi regulasi (X_1) sebesar 0,109 berarti ada pengaruh positif regulasi terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sebesar 0,109 sehingga apabila skor regulasi naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sebesar 0,109 poin.
3. Nilai koefisien regresi komitmen (X_2) sebesar 0,364 berarti ada pengaruh positif komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sebesar 0,364 sehingga apabila skor komitmen naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sebesar 0,364 poin.
4. Nilai koefisien regresi karakteristik individu (X_3) sebesar 0,246 berarti ada pengaruh positif karakteristik individu terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sebesar 0,246 sehingga apabila skor karakteristik individu naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sebesar 0,246 poin.

5. Nilai koefisien regresi perangkat pendukung (X_4) sebesar 0,441 berarti ada pengaruh positif perangkat pendukung terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sebesar 0,441 sehingga apabila skor perangkat pendukung naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sebesar 0,441 poin.

5.1.7. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang berkembang saat ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pengujian, yaitu :

- Uji t (Pengujian secara parsial)
- Uji F (Pengujian secara simultan)
- Uji Beta (Pengujian secara dominan)

Dengan dibantu menggunakan program analisa pengolahan data SPSS Ver. 15., yang dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Untuk menguji variabel secara parsial atau sendiri-sendiri (hipotesis 1,2,3 dan 4) variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dapat digunakan uji t. Ini dapat dilihat dalam hasil analisa pengolahan data SPSS Ver. 15 yang tertuang dalam Tabel 5.14 berikut :

Tabel 5.14

Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	28.957	5.506		5.259	.000			
	VARIABEL REGULASI (X1)	.094	.159	.109	.594	.558	.839	1.192	
	KOMITMEN (X2)	.427	.244	.364	1.750	.092	.655	1.526	
	KARAKTERISTIK -INDIVIDU (X3)	.387	.323	.246	1.201	.241	.674	1.484	
	PERANGKAT-PENDUKUNG (X4)	.489	.214	.441	2.282	.031	.758	1.319	

a. Dependent Variable: PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH (Y)

Sumber : Data Diolah, 2019

Adapun hasil uji t masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh regulasi (X_1) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Y)

a) Merumuskan hipotesis

- $H_0 : b_1 = 0$, artinya X_1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel regulasi terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.
- $H_1 : b_1 \neq 0$, artinya X_1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau ada pengaruh variabel regulasi terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

b) Menghitung nilai t hitung

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS Ver. 15 diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel regulasi sebesar 5,506 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000.

c) Kriteria penerimaan

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $(n-k-1) = 25$. yang ditentukan t_{tabel} sebesar 5,506.

d) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel}

Oleh karena t_{hitung} sebesar 5,506. lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 0,594 yang berarti variabel regulasi signifikan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

2. Pengaruh komitmen (X_2) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Y)

a) Merumuskan hipotesis

- $H_0 : b_2 = 0$, artinya X_2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.
- $H_1 : b_2 \neq 0$, artinya X_2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau ada pengaruh variabel komitmen terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

b) Menghitung nilai t_{hitung}

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS Ver. 15 diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel komitmen sebesar 5,506 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000

c) Kriteria penerimaan

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $(n-k-1) = 25$ yang ditentukan t_{tabel} sebesar 5,506.

d) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel}

Oleh karena t_{hitung} sebesar 5,506 lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1,750 yang berarti variabel komitmen signifikan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

3. Pengaruh karakteristik individu (X_3) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Y)

a) Merumuskan hipotesis

- $H_0 : b_3 = 0$, artinya X_3 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel karakteristik individu terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.
- $H_1 : b_3 \neq 0$, artinya X_3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau ada pengaruh variabel karakteristik individu terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

b) Menghitung nilai t_{hitung}

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS Ver. 15 diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel karakteristik individu sebesar 5,506 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000.

c) Kriteria penerimaan

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $(n-k-1) = 25$ yang ditentukan t_{tabel} sebesar 5,259.

d) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel}

Oleh karena t_{hitung} sebesar 5,506 lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 5,259 yang berarti variabel karakteristik individu signifikan mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

4. Pengaruh perangkat pendukung (X_4) terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Y)

a) Merumuskan hipotesis

- $H_0 : b_4 = 0$, artinya X_4 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel perangkat pendukung terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.
- $H_1 : b_4 \neq 0$, artinya X_4 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau ada pengaruh variabel perangkat pendukung terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang

b) Menghitung nilai t_{hitung}

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS Ver. 15 diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel perangkat pendukung sebesar 5,506 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000

c) Kriteria penerimaan

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas $(n-k-1) = 25$ yang ditentukan t_{tabel} sebesar 2,282

d) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel}

Oleh karena t_{hitung} sebesar 5,506 lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2,282 yang berarti variabel perangkat pendukung berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa data SPSS Ver. 15 maka diketahui bahwa keempat variabel bebas/independen (X) signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dengan ringkasan sebagai berikut :

- Variabel regulasi (X_1) dengan nilai t_{hitung} 0,594 > t_{tabel} 5,259
- Variabel komitmen (X_2) dengan nilai t_{hitung} 1,750 > t_{tabel} 5,259
- Variabel karakteristik individu (X_3) dengan nilai t_{hitung} 1,201 > t_{tabel} 5,259
- Variabel perangkat pendukung (X_4) dengan nilai t_{hitung} 2,282 > t_{tabel} 5,259

2. Pengujian Secara Simultan (Uji-F)

Uji F berfungsi untuk menguji variabel regulasi, komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung (hipotesis 5), apakah dari keempat variabel yang

diteliti mempengaruhi secara simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang. Analisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu program pengolahan data SPSS Ver. 15 yang dapat dijelaskan dalam Tabel 5.15. berikut :

Tabel 5.15

Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	102.885	4	25.721	2.566	.063 ^a
	Residual	250.581	25	10.023		
	Total	353.467	29			

a. Predictors: (Constant), PERANGKAT-PENDUKUNG (X4), VARIABEL REGULASI (X1), KARAKTERISTIK -INDIVIDU (X3), KOMITMEN (X2)

b. Dependent Variable: PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH (Y)

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS Ver. 15 yang dituangkan dalam tabel di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

a) Merumuskann Hipotesis

$H_0 : b_i = 0$, artinya variabel independen (X) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

$H_1 : b_i \neq 0$, variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y)..

b) Menghitung nilai F_{hitung}

Berdasarkan hasil analisa data SPSS diketahui F_{hitung} sebesar 2,566 dengan signifikan 0,000.

c) Menentukan kriteria penerimaan

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah = 0,05 atau dengan interval keyakinan sebesar 95% dengan $df (n-k-1) = 25$ dan ditentukan nilai $F_{tabel} = 2,70$.

d) Membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}

Oleh karena nilai F_{hitung} sebesar 2,566, berarti variabel bebas/independen (X) yang meliputi regulasi, komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang bisa dikatakan signifikan karena dari pengujian menunjukkan bahwa hasil $F_{hitung} = 2,566$ lebih besar dari $F_{tabel} = 2,70$ atau bisa dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima.

3. Pengujian Secara Dominan (Uji Beta)

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized tertinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.16.
Hasil Uji Beta

		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta				Tolerance
1	(Constant)	28.957	5.506		5.259	.000		
	VARIABEL REGULASI (X1)	.094	.159	.109	.594	.558	.839	1.192
	KOMITMEN (X2)	.427	.244	.364	1.750	.092	.655	1.526
	KARAKTERISTIK -INDIVIDU (X3)	.387	.323	.246	1.201	.241	.674	1.484
	PERANGKAT-PENDUKUNG (X4)	.489	.214	.441	2.282	.031	.758	1.319

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel yang meliputi regulasi, komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung maka yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang adalah variabel karakteristik individu (X_3).

Penelitian ini juga menemukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square) dan dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 5.17.

Hasil Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.540 ^a	.291	.178	3.16595	.291	2.566	4	25	.063	1.890

a. Predictors: (Constant), PERANGKAT-PENDUKUNG (X4), VARIABEL REGULASI (X1), KARAKTERISTIK-INDIVIDU (X3), KOMITMEN (X2)

b. Dependent Variable: PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH (Y)

Sumber : Data Diolah, 2019

Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,674 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi regulasi, komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung mempunyai kontribusi terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sebesar 67,4%, sedangkan sisanya sebesar 32,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka setiap pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan pembenahan diri baik berkenaan sumber daya manusia (SDM) maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan dimaksud. Adapun faktor yang diduga berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dibedakan atas dua faktor yaitu faktor yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Faktor yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah meliputi komitmen, karakteristik individu dan perangkat pendukung. Sedangkan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah yaitu perubahan regulasi yang terjadi begitu cepat yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Adanya komitmen yang kuat dari setiap anggota organisasi untuk mendukung penerapan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan akan lebih mempercepat keberhasilan penerapan peraturan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jika diamati bahwa tingkat keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, masih relatif rendah dan terbukti bahwa proses penyelesaian penyusunan APBD sering tidak tepat waktu sebagaimana yang diatur dalam Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu pula penyelesaian penyusunan laporan keuangan semester I yang kadang tidak tepat waktu juga.

Jika dilihat dari fenomena yang digambarkan sesuai hasil penelitian yang diadakan dapat disimpulkan bahwa komitmen anggota organisasi pemerintah daerah belum terlalu tinggi dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan. Ada beberapa faktor yang mereka kemukakan mengapa anggota organisasi tidak terlalu tertarik untuk mempelajari peraturan yang baru diantaranya karena perubahan peraturan yang terjadi begitu cepat kadang berbeda secara signifikan dengan peraturan sebelumnya. Sebagai contoh yaitu akun (kode rekening) dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbeda dengan peraturan sebelumnya. Begitu pula dalam hal penatausahaan keuangan meliputi kegiatan pencatatan atau pembukuan, verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan.

Berdasarkan alasan tersebut seharusnya dapat disimpulkan bahwa regulasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, walaupun hasil penelitian menyimpulkan berbeda. Ada dugaan bahwa regulasi bukan sebagai variabel independen yang secara bersama-sama mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan peraturan tersebut tetapi sebagai moderating variabel yang saling berinteraksi dengan variabel bebas lainnya dalam mempengaruhi keberhasilan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan karakteristik individu ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik individu sangat berperan dalam mencapai keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan PP 71 Tahun 2010. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan yaitu variabel karakteristik individu secara signifikan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hasil uji t yaitu uji secara parsial terhadap variabel ini, mendapatkan bahwa nilai signifikansi dari t hitung adalah lebih kecil dari 0.05.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap objek penelitian, sebagian besar SDM yang ditempatkan pada job tertentu yang berkaitan dengan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta PP 71 Tahun 2010 memiliki jenjang pendidikan yang masih rendah dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan jurusan akuntansi. Sehingga dalam melaksanakan fungsi pelaporan berupa penyusunan laporan keuangan daerah, masing-masing SKPD memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya serta PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap SKPD menyusun laporan keuangan SKPD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Adapun laporan keuangan yang harus disiapkan masing-masing SKPD yaitu :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Operasional (LO);
3. Neraca;
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, faktor yang paling dominan yang menghambat keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta PP 71 Tahun 2010 adalah sumber daya manusia (SDM) yang ada di setiap SKPD. Dari segi kuantitas mereka tidak kekurangan SDM tetapi dari segi kualitas mereka sangat kekurangan. Mereka meyakini bahwa masalah SDM yang berkualitas rendah dalam penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 serta perubahannya dan PP 71 Tahun 2010 tidak hanya dihadapi oleh SKPD bersangkutan, namun menjadi problem umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

Selain masalah Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 dan PP 71 Tahun 2010 juga dipengaruhi adanya ketersediaan perangkat pendukung yang memadai seperti komputer dan perangkat lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perangkat pendukung secara signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta PP 71 Tahun 2010. Hali

ini dapat dilihat dari uji secara parsial dimana nilai signifikansi dari t hitung dari variabel ini lebih kecil dari 0.05.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan regulasi, komitmen dan karakteristik individu terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.
2. Variabel perangkat pendukung yang dominan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang, berdasarkan hasil nilai beta standardized yang paling besar.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menghasilkan generalisasi dengan berupaya menekan sekecil mungkin berbagai faktor yang dapat mengurangi makna dari temuan hasil penelitian yang telah dicapai. Bagaimanapun tingginya tingkat ketelitian suatu alat ukur/instrumen yang digunakan dalam mengukur fenomena, serta bagaimanapun cermatnya pengukuran dilakukan oleh peneliti, tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan sekecil apapun kesalahan tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi penelitian ini.

Oleh karena itu dengan segala kebesaran hati penulis mengemukakan bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan. Salah satu yang paling mungkin

adalah proses pengumpulan data, dimana para responden dalam memberikan penilaian terhadap pernyataan-pernyataan yang diberikan melalui alat ukur skala Likert, dipengaruhi oleh unsur-unsur yang sifatnya subyektivitas.

Sehubungan dengan metode yang digunakan adalah metode survei yang tidak memerlukan pengontrolan variabel penelitian, maka kebenaran pengaruh yang dihipotesiskan hanya didasarkan pada keyakinan penemuan melalui pengujian hipotesis.

6.3. Saran-saran

Dari kesimpulan hasil penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari keempat variabel independen (X) menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai kontribusi yang berbeda terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 variabel yang tidak berpengaruh signifikan dan salah satunya berpengaruh signifikan. Yang tidak berpengaruh signifikan yaitu variabel independen (X) yang meliputi regulasi (X₁), komitmen (X₂), karakteristik individu (X₃), sedangkan yang berpengaruh signifikan hanya perangkat pendukung (X₄) yang dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang sehingga pihak instansi dapat lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang.

3. Berdasarkan hasil pembahasan dan pengalaman selama penelitian, terlepas dari kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka diusulkan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang atau bagi peneliti yang bermaksud mengembangkan penelitian sejenis yaitu :
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi yang ada pada mempunyai pengaruh terhadap tingkat implementasi pengelolaan keuangan. Untuk lebih meningkatkan peranannya dalam mewujudkan implementasi pengelolaan keuangan pada organisasi, hendaknya dalam memberi umpan balik kepada pegawai agar dapat bertindak objektif dalam memberikan penilaian serta menyampaikan umpan balik dengan cara pendekatan secara persuasif (mendidik), agar pegawai dapat menerimanya sebagai koreksi atas komitmen yang dilakukan.
4. Upaya-upaya menciptakan implementasi pengelolaan organisasi pada dasarnya merupakan upaya penciptaan suasana saling percaya dan mendukung antara pekerja dan manajemen, sehingga masing-masing pihak menyumbangkan kontribusi mereka bagi tercapainya tujuan pihak lain dan pertukaran tersebut dilakukan dengan lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Baridwan, Z., 2014, *Sistem Akuntansi*, BPFE, Yogyakarta.
- Benyamin, H., 2013, *Peranan Administrator Pemerintah Daerah*, LP3ES. Indonesia, Jakarta.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta.
- Dunn, William N, 2014, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2014, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Jaya Kirana, Wihana, 2014, *Analisis Potensi Keuangan Daerah, Pendekatan Makro*, PPPEB UGM Yogyakarta.
- Jones, Charles O, 2012, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu, 2010, *Prospek Otonomi Daerah: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kunarjo., 2012, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi ketiga, UI-Press, Jakarta.
- Kuncoro, M., 2013, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, "Prisma", No. 4, 3-17.
- Mamesah, D.J, 2013, *Sistem Keuangan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo, 2012, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Munir, Dasril, Dkk. 2013, *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, YPAPI, Yogyakarta
- Nawawi, Hadari, 2010, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.

- Nugroho D, Riant, 2012, *Analisis Kebijakan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Pujipurnomo, 2012, *Metodologi Penelitian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Putra, Fadillah, 2014, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soenarko, 2011, *Kebijaksanaan Pemerintah*, Airlangga Universty Press, Surabaya.
- Subarsono, 2013, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul, 2010, *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, 2012, *Manajemen Pelayanan Publik*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Wibawa, Samudra, 2012. *Evalusi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- World Bank, 2012
- Zainal Abidin, Said, 2012, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah".
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/316/BAKD tahun 2012. tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.



LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI NOBEL INDONESIA
STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR
Jalan Sultan Alauddin No. 212 Makassar Sulawesi Selatan 90222
Telp : 081343774489 / 085299972162

TANDA BUKTI BEBAS PLAGIASI

Nama : AGURHAN
NIM : 2017.MM.2.0809
Judul Tesis : Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang

Setelah dilakukan pegujian secara manual Tesis tersebut pada tanggal 4 Agustus 2020 maka Tesis diatas dinyatakan bebas dari plagiasi.



Tim Uji Plagiasi

Dr.H.Muhammad Hidayat,SE,.MM

Ketua

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	2.2433	.29324	30
X1	2.8133	.30596	30
X2	2.9067	.66173	30
X3	2.6933	.64430	30
X4	1.9800	.56654	30

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X4 ^a , X2, X1, X3	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.821 ^a	.674	.409	.30883	2.187

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.109	4	28.027	56.287	.000 ^a
	Residual	2.384	25	.095		
	Total	2.494	29			

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

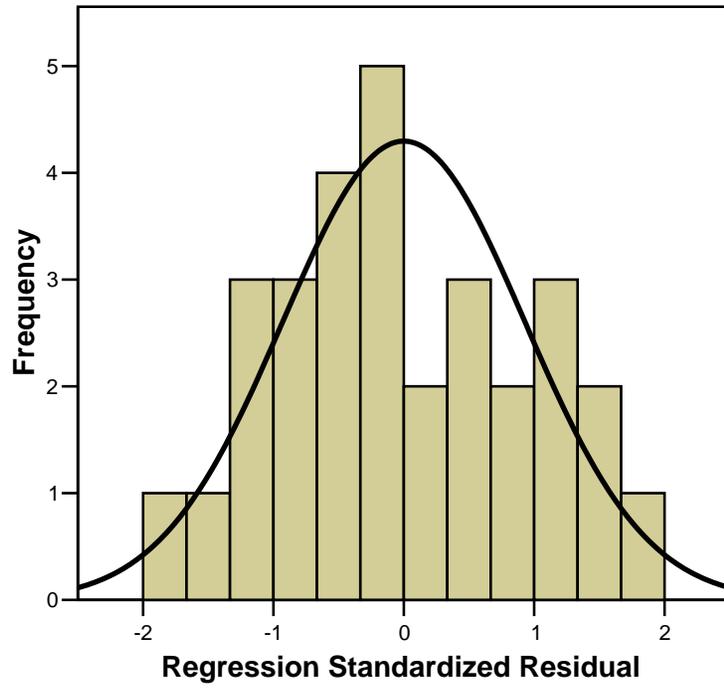
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VF
1	(Constant)	2.573	.605		4.253	.000		
	X1	.184	.201	.192	3.913	.000	.866	3.155
	X2	.072	.096	.016	3.075	.000	.810	3.235
	X3	.579	.102	.473	4.772	.000	.762	3.313
	X4	.017	.103	.003	3.016	.000	.974	3.026

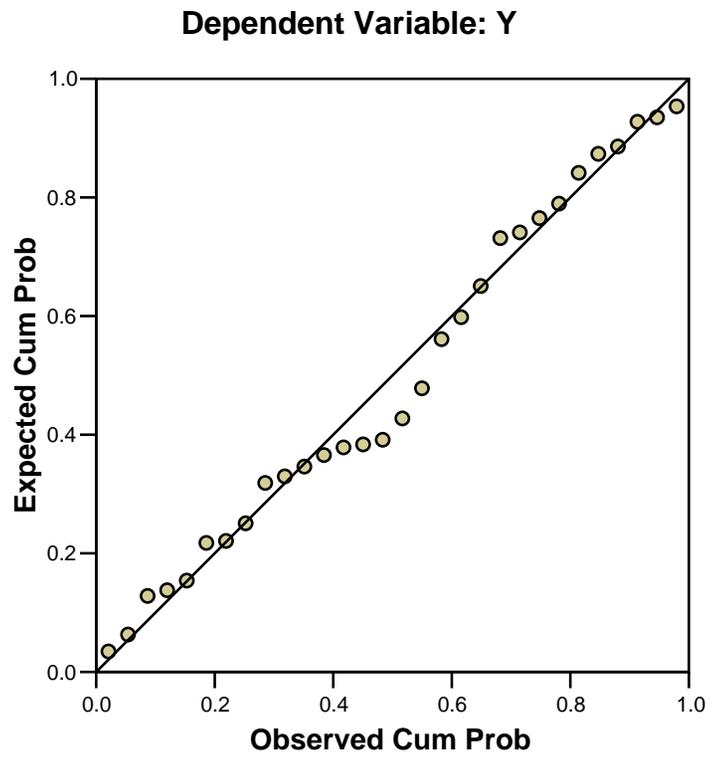
a. Dependent Variable: Y

Histogram

Dependent Variable: Y

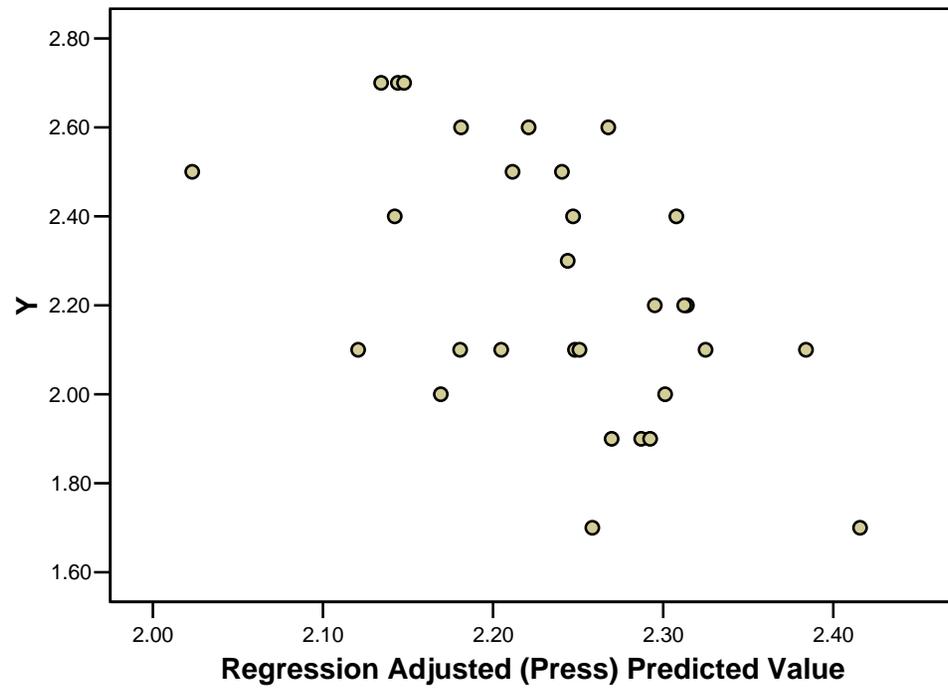


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



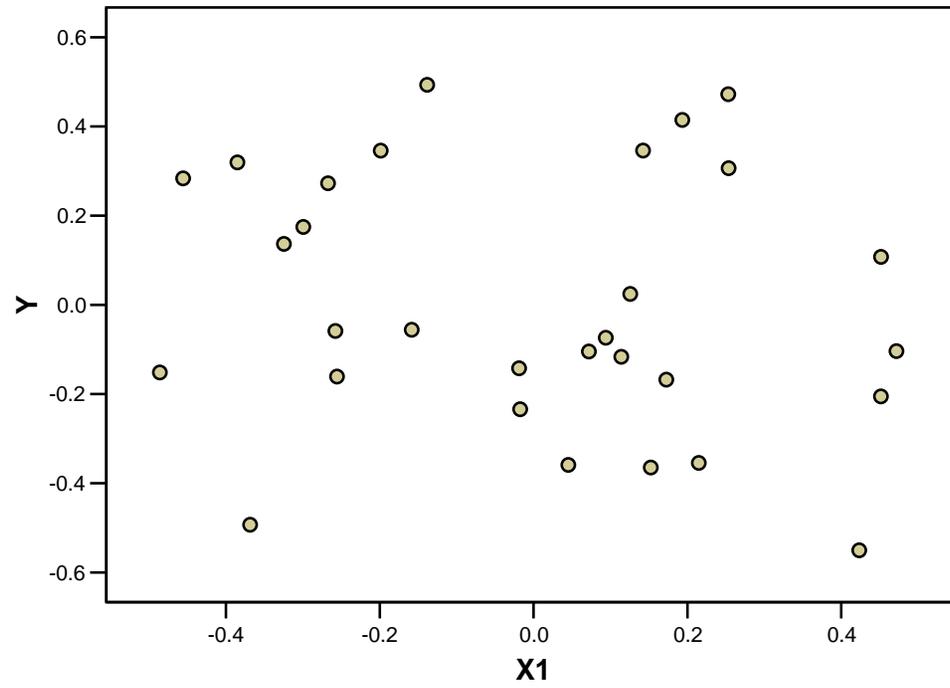
Scatterplot

Dependent Variable: Y



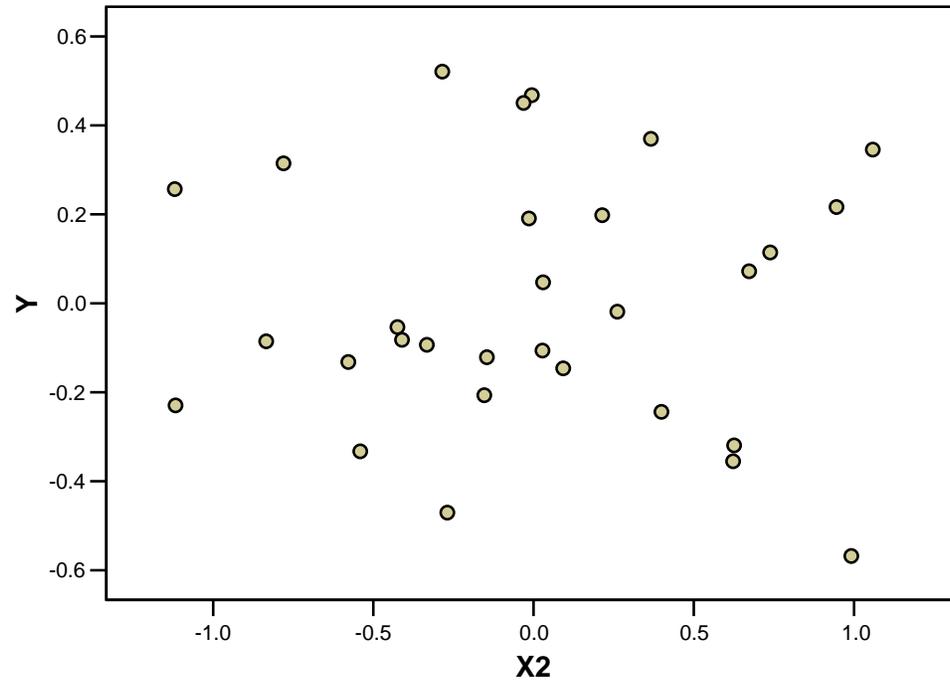
Partial Regression Plot

Dependent Variable: Y



Partial Regression Plot

Dependent Variable: Y



Partial Regression Plot

Dependent Variable: Y

